



BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BUOL
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN BIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

- Menimbang : a. bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk meningkatkan iklim investasi dan memberikan nilai tambah terhadap ruang wilayah Kabupaten Buol, diperlukan rencana detail tata ruang yang memberikan kepastian hak dan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat dalam pemanfaatan ruang;

KABAG HUKUM	INSPEKTORAT	KEPLABKAD	ASISTEN	SEKDA
				

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 7 dan angka 10 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengubah Pasal 14 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Biau;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

KABAG HUKUM	INSPEKTOR	KEMASPLUD	ASISTEN	SEKDA
				

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan

KABAG HUKUM	INSPEKTORAT	KEPALA BIDANG	ASISTEN	SEKDA
Ah	2	\$	f	Ma

Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);

9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 - 2042 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 158, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 144);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buol Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2012 Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN BIAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang terdiri atas ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola

Ruang.				
KABAG HUKUM	INSPEKTORAT	KEPALA BIDANG	ASISTEN	SEKDA
				

3. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
4. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang terdiri atas peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
5. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
6. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
7. Perencanaan Tata Ruang adalah adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang.
8. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
9. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
10. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
11. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan PZ kabupaten.
12. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan kawasan strategis kabupaten yang akan disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan didalam RTRW kabupaten.
13. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
14. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan

karakteristik spesifik.

KABAG HUKUM	INSPEKTORAT	KEPALA BIDANG	ASISTEN	SEKDA
				

15. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
16. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kabupaten.
17. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
18. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
19. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
20. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
21. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

KABAG HUKUM	INSPEKTUR	KEPALA BIDAN	ASISTEN	SEKDA
<i>f</i>	<i>h</i>	<i>\$</i>	<i>f</i>	<i>A</i>

22. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
23. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
24. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
25. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
26. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
27. Daerah adalah Kabupaten Buol.
28. Bupati adalah Bupati Buol.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- tujuan penataan WP;
- rencana Struktur Ruang;
- rencana Pola Ruang;
- ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- PZ; dan
- kelembagaan.

KADAG HUKUM	INSPEKTORAT	KEMAJUAN	ASISTEN	SEKDA
A	B	C	D	E

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3

- (1) Deliniasi WP Perkotaan Biau ditetapkan sebagai WP I berdasarkan aspek fungsional dengan luas 6.365,52 (enam ribu tiga ratus enam puluh lima koma lima dua) hektare.
- (2) Batas WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Karamat;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulawesi;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bokat, Kecamatan Bukal, dan Kecamatan Momunu; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Momunu dan Kecamatan Karamat.
- (3) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seluruh Kelurahan Bugis di Kecamatan Biau;
 - b. seluruh Kelurahan Buol di Kecamatan Biau;
 - c. seluruh Kelurahan Kulango di Kecamatan Biau;
 - d. seluruh Kelurahan Leok II di Kecamatan Biau;
 - e. sebagian Kelurahan Kali di Kecamatan Biau;
 - f. sebagian Kelurahan Kumaligon di Kecamatan Biau; dan
 - g. sebagian Kelurahan Leok I di Kecamatan Biau.
- (4) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) SWP meliputi:
 - a. SWP I.A mencakup sebagian Kelurahan Kulango, seluruh Kelurahan Leok II, sebagian Kelurahan Leok I, sebagian Kelurahan Buol, dan sebagian Kelurahan Kali terdiri atas Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9;
 - b. SWP I.B mencakup sebagian Kelurahan Kali, sebagian Kelurahan Kumaligon, dan sebagian Kelurahan Leok I

KABAG HUKUM	INSPEKTORAT	KAPALAKSIAD	ASISTEN	SEKDA
				

terdiri atas Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan

c. SWP I.C mencakup seluruh Kelurahan Bugis, sebagian Kelurahan Kulango, dan sebagian Kelurahan Buol terdiri atas Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.

(5) Delineasi WP Perkotaan Biau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6) Pembagian SWP dan Blok pada WP Perkotaan Biau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Tujuan penataan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu mewujudkan Perkotaan Biau sebagai pusat pelayanan perkotaan berskala regional yang layak huni dalam mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah, peningkatan kualitas sumber daya, dan ketahanan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

(1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 huruf b meliputi:

KABAG HUKUM	INSPEKTUR	KORPORASI	KORPORASI	SENDA
				

- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Biau terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3.
- (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pusat lingkungan kecamatan; dan
 - b. pusat lingkungan kelurahan/desa.
- (5) Pusat lingkungan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
- (6) Pusat lingkungan kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.8;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2.

KABUPATEN	INSPEKTOR	KORPORASI	ASISTEN	SEKDA
				

- (7) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
- jalan umum;
 - terminal penumpang;
 - terminal barang;
 - jembatan;
 - halte;
 - pelabuhan pengumpan; dan
 - pelabuhan perikanan.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1

Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
- jalan arteri primer;
 - jalan kolektor primer;
 - jalan kolektor sekunder;
 - jalan lokal primer;

KABAG HUKUM	INSPEKTORAT	KEPALA BIDANG	ASISTEN	SEKDA
				

- e. jalan lokal sekunder;
 - f. jalan lingkungan primer; dan
 - g. jalan lingkungan sekunder.
- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ruas jalan BUOL - LAKUAN melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C; dan
 - b. ruas jalan LOKODOKA - BUOL melintas di SWP I.C.
- (3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Jln. M.A. TURUNGKU (BUOL) melintas di SWP I.A;
 - b. ruas jalan MOMUNU – KALI melintas di SWP I.A; dan
 - c. Jalan Lingkar Kota Buol melintas di SWP I.B.
- (4) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Jalan Batalipu (Kota Buol) melintas di SWP I.A;
 - b. Jalan Zansibar (Kota Buol) melintas di SWP I.A;
 - c. Jalan Kemiri (Kota Buol) melintas di SWP I.A; dan
 - d. ruas jalan Buol – Bandara melintas di SWP I.A.
- (5) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (6) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (7) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (8) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.

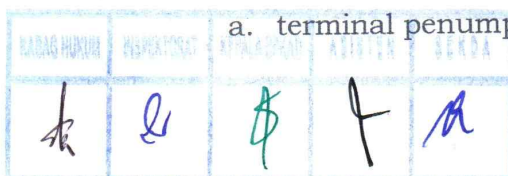
Paragraf 2

Terminal Penumpang

Pasal 9

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. terminal penumpang tipe B; dan



- b. terminal penumpang tipe C.
- (2) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Terminal Penumpang Leok terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (3) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.

Paragraf 3

Terminal Barang

Pasal 10

Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.

Paragraf 4

Jembatan

Pasal 11

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. jembatan yang terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.8;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- b. Jembatan Samratulangi di SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.6;
- c. Jembatan Julunau di SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.6;
- d. Jembatan Batalipu 1 di SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.6;
- e. Jembatan Batalipu 2 di SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.6;
- f. Jembatan R.A Kartini di SWP I.A pada Blok I.A.4;
- g. Jembatan B. Salakea di SWP I.A pada Blok I.A.4;
- h. Jembatan Pemuda di SWP I.A pada Blok I.A.4;
- i. Jembatan Ir. Soekarno di SWP I.A pada Blok I.A.6;

KABAG HUKUM	INSPEKTORAT	KEMALUPOKAS	ASISTEN	BENDA
				

- j. Jembatan Kalangkangan di SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
- k. Jembatan Kalangkangan 1 di SWP I.A pada Blok I.A.6 dan Blok I.A.8;
- l. Jembatan Kulango di SWP I.A pada Blok I.A.8 dan Blok I.A.9;
- m. Jembatan Kasanangan di SWP I.A pada Blok I.A.8 dan Blok I.A.9;
- n. Jembatan Kelinci di SWP I.A pada Blok I.A.8;
- o. Jembatan Zebra di SWP I.A pada Blok I.A.8;
- p. Jembatan Pinang di SWP I.A pada Blok I.A.9;
- q. Jembatan Kulango 1 di SWP I.A pada Blok I.A.9;
- r. Jembatan Kulango 2 di SWP I.A pada Blok I.A.9;
- s. Jembatan Kulango 3 di SWP I.A pada Blok I.A.9;
- t. Jembatan Kulango 4 di SWP I.A pada Blok I.A.9;
- u. Jembatan Unta di SWP I.A pada Blok I.A.9;
- v. Jembatan Tirtaria 1 di SWP I.A pada Blok I.A.9;
- w. Jembatan Tirtaria 2 di SWP I.A pada Blok I.A.9;
- x. Jembatan Kumaligon 1 di SWP I.B pada Blok I.B.1;
- y. Jembatan Kumaligon 2 di SWP I.B pada Blok I.B.1;
- z. Jembatan Kumaligon 3 di SWP I.B pada Blok I.B.1;
- aa. Jembatan Tontoyong 1 di SWP I.B pada Blok I.B.3;
- bb. Jembatan Tontoyong 2 di SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.4;
- cc. Jembatan Tontoyong 3 di SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.4;
- dd. Jembatan Kamboja di SWP I.B pada Blok I.B.2;
- ee. Jembatan Beringin di SWP I.B pada Blok I.B.3;
- ff. Jembatan Asoka di SWP I.B pada Blok I.B.3;
- gg. Jembatan Hi. M. Suhong di SWP I.B pada Blok I.B.3;
- hh. Jembatan Kel. Bugis 1 di SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
- ii. Jembatan Bouyong di SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

KABAG. HUKUM	INSPEKTUR	KAPALASPID	ASISTEN	SEKDA
				

Paragraf 5

Halte

Pasal 12

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.8; dan
- b. SWP I.B pada Blok I.B.2.

Paragraf 6

Pelabuhan Pengumpan

Pasal 13

- (1) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. pelabuhan pengumpan regional; dan
 - b. pelabuhan pengumpan lokal.
- (2) Pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Pelabuhan Pengumpan Regional Leok terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2.
- (3) Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Pelabuhan Pengumpan Lokal Kumaligon di SWP I.B pada Blok I.B.1.

Paragraf 7

Pelabuhan Perikanan

Pasal 14

- (1) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g berupa pangkalan pendaratan ikan.
- (2) Pangkalan pendaratan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pangkalan Pendaratan Ikan Kumaligon yang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.

KABAG. HUKUM	INSPEKTUR	KORPORASI	ASISTEN	SEKDA
				

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. rencana jaringan energi;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan sumber daya air;
- d. rencana jaringan air minum;
- e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- f. rencana jaringan persampahan;
- g. rencana jaringan drainase; dan
- h. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Energi

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung;
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - c. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - d. gardu listrik.
- (2) Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yaitu PLTD Leok di SWP I.B pada Blok I.B.2.

KABAG HUKUM	INSPEKTORAT	KOPALAGMAD	ASISTEN	SEKDA
				

- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa saluran udara tegangan tinggi (SUTT) meliputi:
- SUTT Leok – Tolingula melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C; dan
 - SUTT Tolitoli – Leok melintas di SWP I.B.
- (4) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa saluran udara tegangan menengah (SUTM) melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- gardu induk yaitu Gardu Induk Leok/Buol + 2 LB arah Tolingula terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - gardu distribusi terdapat di:
 - SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9;
 - SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 - SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.
- (6) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:

a. jaringan tetap; dan				
				

- b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik meliputi:
 - a. jaringan serat optik Jalur Barat – Utara yaitu sepanjang Santigi – Kotaraya – Tolitoli – Buol melintas di SWP I.A dan SWP I.B; dan
 - b. jaringan serat optik melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *base transceiver station* (BTS) terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.4 dan Blok I.A.9; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.3.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan irigasi primer meliputi:
 - 1. Jaringan Irigasi Biau melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C;
 - 2. Jaringan Irigasi Botakio Buol melintas di SWP I.A dan SWP I.C; dan

KABUPATEN	INSPEKTORAT	KEMALANGAN	ADISTEN	REKDA
				

3. Jaringan Irigasi Botakio Popugu melintas di SWP I.A.
- b. jaringan irigasi sekunder meliputi:
 1. Jaringan Irigasi Kulango melintas di SWP I.A;
 2. Jaringan Irigasi Biau melintas di SWP I.C; dan
 3. Jaringan Irigasi Bugis melintas di SWP I.C.
- c. jaringan irigasi tersier meliputi:
 1. Jaringan Irigasi Buol melintas di SWP I.A;
 2. Jaringan Irigasi Kumaligon melintas di SWP I.B;
 3. Jaringan Irigasi Kulango melintas di SWP I.A; dan
 4. Jaringan Irigasi Bugis melintas di SWP I.C.
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jaringan pengendalian banjir melintas di SWP I.A; dan
 - b. bangunan pengendalian banjir terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.8.
- (4) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa prasarana irigasi yaitu Bendung Kulango yang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.9.
- (5) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 19

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. unit air baku meliputi:				
				

1. bangunan pengambil air baku terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.9; dan
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.4.
2. jaringan transmisi air baku melintas di SWP I.A dan SWP I.B.
- b. unit produksi berupa instalasi produksi terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.9; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2.
- c. unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- d. unit pelayanan meliputi:
 1. sambungan langsung terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.4; dan
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
 2. hidran umum terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 - c) SWP I.C pada Blok I.C.1.
 3. hidran kebakaran terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.5.
- (3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bangunan penangkap mata air terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (4) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 20

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e meliputi:

PADANG HURUF	WISATA	WISATA	WISATA	WISATA
				

- a. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
 - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sub-sistem pengolahan setempat terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1.
 - (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa subsistem pengolahan terpusat.
 - (4) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4 dan Blok I.A.7.
 - (5) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4.
 - (6) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 21

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f meliputi:
 - a. tempat penampungan sementara (TPS); dan
 - b. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).
- (2) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:

KABUPATEN	KEPONTEN	KEMALAYAN	ARISTEN	SEKOA
				

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.6;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (3) Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2.
- (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8

Rencana Jaringan Drainase

Pasal 22

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP I.A dan SWP I.B.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 -tercantum dalam Lampiran III.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

KABUPATEN	KANTON	KELURAHAN	ALISTEN	SEKDA
				

Paragraf 9
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 23

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi; dan
 - c. jaringan pejalan kaki; dan
 - d. pengaman pantai.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ruas jalan BUOL – LAKUAN melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C;
 - b. Jln. M.A. TURUNGKU (BUOL) melintas di SWP I.A;
 - c. Jalan Zansibar (Kota Buol) melintas di SWP I.A;
 - d. Jalan Batalipu (Kota Buol) melintas di SWP I.A;
 - e. ruas jalan MOMUNU – KALI melintas di SWP I.A;
 - f. ruas jalan LOKODOKA – BUOL melintas di SWP I.C;
 - dan
 - g. jalan lokal primer melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. titik kumpul; dan
 - b. tempat evakuasi sementara.
- (4) Titik kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdapat di Damar Leok I di SWP I.B pada Blok I.B.2.
- (5) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdapat di:
 - a. Lapangan Kantor Bupati Buol di SWP I.A pada Blok I.A.5;
 - b. Lapangan Kampus STISIPOL YPP Mujahidin Buol di SWP I.A pada Blok I.A.9;
 - c. Lapangan SMKN 2 Biau di SWP I.A pada Blok I.A.9;
 - dan

KABAGHINMUN	INSPEKTORAT	KORLATPAD	ASISTEN	SEKDA
				

- d. Lapangan Terminal Penumpang Leok di SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (6) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
- Jln. M.A. TURUNGKU (BUOL) yang melintas di SWP I.A;
 - Jalan Batalipu (Kota Buol) yang melintas di SWP I.A;
 - Jalan Zansibar (Kota Buol) yang melintas di SWP I.A; dan
 - ruas jalan BUOL – LAKUAN yang melintas di SWP I.A dan SWP I.B.
- (7) Pengaman pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di SWP I.A dan SWP I.B.
- (8) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
- Zona Lindung; dan
 - Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

KABUPATEN	INSPEKTOR	KORPORASI	ASISTEN	SEKDA
				

Bagian Kedua

Zona Lindung

Pasal 25

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
- b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
- c. Zona cagar budaya dengan kode CB; dan
- d. Zona ekosistem mangrove dengan kode EM.

Paragraf 1

Zona Perlindungan Setempat

Pasal 26

- (1) Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dengan luas 124,42 (seratus dua puluh empat koma empat dua) hektare berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS.
- (2) Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 124,42 (seratus dua puluh empat koma empat dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.8;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.

Paragraf 2

Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 27

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dengan

KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK
A	B	C	D	E

luas 46,34 (empat puluh enam koma tiga empat) hektare meliputi:

- a. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
 - b. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - c. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - d. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5;
 - e. Sub-Zona taman RT dengan kode RTH-6;
 - f. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - g. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 27,32 (dua puluh tujuh koma tiga dua) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.7; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
- (3) Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 3,76 (tiga koma tujuh enam) hektare terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3.
- (4) Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 5,52 (lima koma lima dua) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.5, dan Blok I.A.8;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
- (5) Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 1,61 (satu koma enam satu) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.4 dan Blok I.A.6; dan
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (6) Sub-Zona taman RT dengan kode RTH-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 1,05 (satu koma nol lima) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.7; dan
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.3.

KABAG HUKUM	INSPEKTUR	KAPLAHDAD	ASISTEN	SEKDA
				

- (7) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas 4,30 (empat koma tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.8 dan Blok I.A.9;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- (8) Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan luas 2,77 (dua koma tujuh tujuh) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, dan Blok I.A.7.

Paragraf 3

Zona Cagar Budaya

Pasal 28

- (1) Zona cagar budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dengan luas 0,27 (nol koma dua tujuh) hektare berupa Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB.
- (2) Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,27 (nol koma dua tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.3.

Paragraf 4

Zona Ekosistem Mangrove

Pasal 29

- (1) Zona ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dengan luas 56,79 (lima puluh enam koma tujuh sembilan) hektare berupa Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM.
- (2) Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 56,79

KABUPATEN	KANTON	KELURAHAN	ALIRAN	SEKDA
A	B	C	D	E

(lima puluh enam koma tujuh sembilan) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 30

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Zona hutan produksi dengan kode KHP;
- b. Zona pertanian dengan kode P;
- c. Zona perikanan dengan kode IK;
- d. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
- e. Zona pariwisata dengan kode W;
- f. Zona perumahan dengan kode R;
- g. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- h. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- i. Zona perkantoran dengan kode KT;
- j. Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP;
- k. Zona transportasi dengan kode TR;
- l. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK; dan
- m. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL.

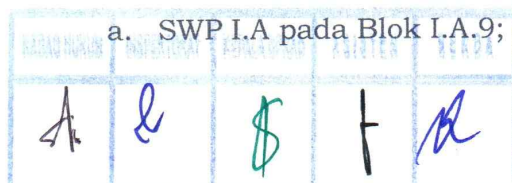
Paragraf 1

Zona Hutan Produksi

Pasal 31

- (1) Zona hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dengan luas 1.305,14 (seribu tiga ratus lima koma satu empat) hektare berupa Sub-Zona hutan produksi tetap dengan kode HP.
- (2) Sub-Zona hutan produksi tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 1.305,14 (seribu tiga ratus lima koma satu empat) hektare terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.9; dan



b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.4.

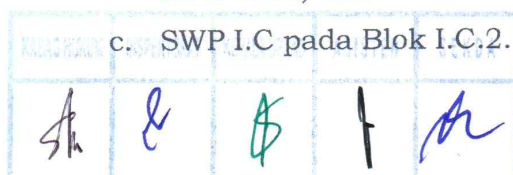
Paragraf 2

Zona Pertanian

Pasal 32

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dengan luas 3.021,96 (tiga ribu dua puluh satu koma sembilan enam) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2;
 - c. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3; dan
 - d. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4.
- (2) Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 133,21 (seratus tiga puluh tiga koma dua satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.8 dan Blok I.A.9;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
- (3) Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 198,52 (seratus sembilan puluh delapan koma lima dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.5, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2.
- (4) Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 2.689,29 (dua ribu enam ratus delapan puluh sembilan koma dua sembilan) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.5, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan

c. SWP I.C pada Blok I.C.2.



- (5) Sub-Zona peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 0,95 (nol koma sembilan lima) hektare terdapat di:
- SWP I.A pada Blok I.A.9; dan
 - SWP I.B pada Blok I.B.4.

Paragraf 3
Zona Perikanan

Pasal 33

- (1) Zona perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dengan luas 458,79 (empat ratus lima puluh delapan koma tujuh sembilan) hektare meliputi:
- Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1; dan
 - Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2.
- (2) Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 0,90 (nol koma sembilan) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (3) Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 457,89 (empat ratus lima puluh tujuh koma delapan sembilan) hektare terdapat di:
- SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 - SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.

Paragraf 4
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 34

- (1) Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d dengan luas 3,23 (tiga koma dua tiga) hektare berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL.

MAJLIS	KEWASITAN	KEKAWASITAN	KEKAWASITAN	KEKAWASITAN
				

- (2) Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL dengan luas 3,23 (tiga koma dua tiga) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.

Paragraf 5
Zona Pariwisata

Pasal 35

- (1) Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e dengan luas 0,83 (nol koma delapan tiga) hektare berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W.
- (2) Sub-Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,83 (nol koma delapan tiga) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.5 dan Blok I.A.9; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1.

Paragraf 6
Zona Perumahan

Pasal 36

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f dengan luas 928,23 (sembilan ratus dua puluh delapan koma dua tiga) hektare meliputi:
- a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - c. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 46,48 (empat puluh enam koma empat delapan)

KABUPATEN	INSPEKTOR	KAPALAYAK	ASISTEN	SEKDA
Ah	h	h	f	A

hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.6.

- (3) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 857,53 (delapan ratus lima puluh tujuh koma lima tiga) hektare terdapat di:
- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9;
 - SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 - SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.
- (4) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 24,22 (dua puluh empat koma dua dua) hektare terdapat di:
- SWP I.A pada Blok I.A.5;
 - SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 - SWP I.C pada Blok I.C.1.

Paragraf 7

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 37

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g dengan luas 32,63 (tiga puluh dua koma enam tiga) hektare meliputi:
- Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
 - Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 13,81 (tiga belas koma delapan satu) hektare terdapat di:

KABUPATEN	KEMENTERIAN	KEMENTERIAN	ASISTEN	SEKDA
				

- a. SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, dan Blok I.A.9; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2.
- (3) Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 6,03 (enam koma nol tiga) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.9;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
- (4) Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 12,67 (dua belas koma enam tujuh) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.
- (5) Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 0,12 (nol koma satu dua) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.6; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1.

Paragraf 8

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 38

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h dengan luas 180,07 (seratus delapan puluh koma nol tujuh) hektare meliputi:
- a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.

KABUPATEN	INSPEKTOR	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 140,65 (seratus empat puluh koma enam lima) hektare terdapat di:
- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 32,12 (tiga puluh dua koma satu dua) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9.
- (4) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 7,30 (tujuh koma tiga) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.6 dan Blok I.A.7.

Paragraf 9

Zona Perkantoran

Pasal 39

- (1) Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf i dengan luas 35,71 (tiga puluh lima koma tujuh satu) hektare berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT.
- (2) Sub-Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 35,71 (tiga puluh lima koma tujuh satu) hektare terdapat di:
- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2 Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, dan Blok I.A.8;
 - SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 - SWP I.C pada Blok I.C.2.

PANG HURUH	WAKIL HURUH	KAPALATIM	ASISTEN	SEKDA
A	2	\$	f	a

Paragraf 10
Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 40

- (1) Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf j dengan luas 4,94 (empat koma sembilan empat) hektare berupa Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP.
- (2) Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 4,94 (empat koma sembilan empat) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2.

Paragraf 11
Zona Transportasi

Pasal 41

- (1) Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf k dengan luas 10,38 (sepuluh koma tiga delapan) hektare berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR.
- (2) Sub-Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 10,38 (sepuluh koma tiga delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.1.

Paragraf 12
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 42

- (1) Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf l dengan luas 0,60 (nol koma enam) hektare berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

KABAGHUKUM	INSPEKTORAT	KEPALA BIDANG	ASISTEN	SEKDA
				

- (2) Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,60 (nol koma enam) hektare terdapat di:
- SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; dan
 - SWP I.B pada Blok I.B.2.

Paragraf 13

Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 43

- (1) Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf m dengan luas 2,83 (dua koma delapan tiga) hektare meliputi:
- Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3; dan
 - Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6.
- (2) Sub -Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 0,40 (nol koma empat) hektare terdapat di:
- SWP I.A pada Blok I.A.9; dan
 - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
- (3) Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 2,43 (dua koma empat tiga) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.

BAB VI

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 44

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam

MEMANGGIL	DEKAT	KEBANYAKAN	ARTISTIK	SEKDA
A	2	3	1	12

mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Perkotaan Biau.

- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelaksanaan konfirmasi KKPR; dan
 - b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan konfirmasi KKPR di WP Perkotaan Biau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 46

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. program perwujudan;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP dan/atau Blok.

KABUPATEN	INSPEKTOR	KAPALAYAT	ASISTEN	SEKDA
				

- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- kementerian/lembaga;
 - perangkat daerah;
 - swasta;
 - Masyarakat; dan/atau
 - pemangku kepentingan lainnya.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- tahap I pada periode tahun 2024;
 - tahap II pada periode tahun 2025-2029;
 - tahap III pada periode tahun 2030-2034;
 - tahap IV pada periode tahun 2035-2039; dan
 - tahap V pada periode tahun 2040-2043.
- (7) Indikasi Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berupa aturan dasar.

KABAGHUKUM	INSPEKTORAT	KAPALABANG	ASISTEN	SEKDA
				

Bagian Kedua

Aturan Dasar

Pasal 48

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 1

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 49

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a terdiri atas:
 - a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
 - b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
 - c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan
 - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan

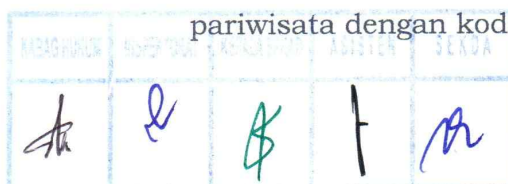
PANGKALAN	INSPEKSI	KEHUTANAN	ASISTEN	SEKDA
				

kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;
 - b. pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun di dalam persil, bertujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya; dan
 - c. pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada dan mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan secara bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu, berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus mengingat pemanfaatan ruang tersebut memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya seperti menyediakan tempat parkir, tidak menghambat laju lalu lintas, dan/atau menghitung dampak lingkungan.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

KABUPATEN	KOTA	KABUPATEN	KOTA	KABUPATEN	KOTA
					

- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
 - b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH meliputi:
 - 1. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
 - 2. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - 3. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - 4. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5;
 - 5. Sub-Zona taman RT dengan kode RTH-6;
 - 6. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - 7. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
 - c. Zona cagar budaya dengan kode CB berupa Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB; dan
 - d. Zona ekosistem mangrove dengan kode EM berupa Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM.
- (8) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
- a. Zona hutan produksi dengan kode KHP berupa Sub-Zona hutan produksi tetap dengan kode HP;
 - b. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
 - 1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - 2. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2;
 - 3. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3; dan
 - 4. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4.
 - c. Zona perikanan dengan kode IK meliputi:
 - 1. Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1; dan
 - 2. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2;
 - d. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
 - e. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W;



- f. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
 1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- g. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
 1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
 3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 4. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
- h. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
 1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 3. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- i. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT;
- j. Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP berupa Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP;
- k. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR;
- l. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK; dan
- m. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL meliputi:
 1. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3; dan

2. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6.

KABANG HUKUM	INSPEKTOR	KABANG HUKUM	INSPEKTOR	KABANG HUKUM
<i>th</i>	<i>g</i>	<i>g</i>	<i>t</i>	<i>R</i>

- (9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 50

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b meliputi:
- koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
 - Koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum;
 - koefisien dasar hijau (KDH) minimal; dan
 - luas kaveling minimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 51

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c meliputi:
- ketinggian bangunan (TB) maksimum;
 - garis sempadan bangunan (GSB) minimum;
 - jarak bebas antar bangunan minimal; dan
 - jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB) minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

KABAG HUKUM	INSPEKTORAT	KEPALA BIDANG	ASISTEN	SEKDA
				

Paragraf 4

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 52

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap Zona.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar Zona berfungsi secara optimal.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Ketentuan Khusus

Pasal 53

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e terdiri atas:

- a. kawasan keselamatan operasi penerbangan;
- b. lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- c. kawasan rawan bencana;
- d. tempat evakuasi bencana; dan
- e. kawasan sempadan.

Pasal 54

- (1) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a meliputi:

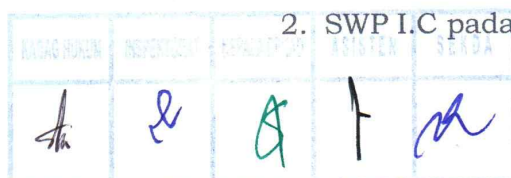
KAWASAN	a.	kawasan	ancangan	pendaratan	dan	lepas	landas;
Ah	2	8	f	M			

- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - c. kawasan di bawah permukaan transisi;
 - d. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
 - e. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
 - f. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar.
- (2) Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2;
 - b. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2;
 - c. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2;
 - d. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2;
 - e. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2; dan
 - f. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2.
- (3) Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2;
 - b. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2; dan
 - c. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2.
- (4) Kawasan di bawah permukaan transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2;
 - b. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2; dan
 - c. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2.
- (5) Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

KABUPATEN	KEPANTAR	KABUPATEN	ASISTEN	SEKDA
A	B	C	D	E

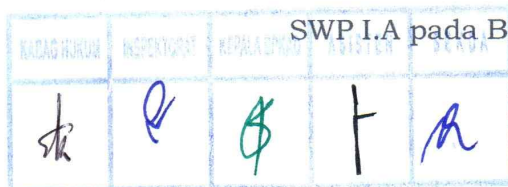
- a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;
 - b. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;
 - c. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3; dan
 - d. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3.
- (6) Kawasan di bawah permukaan kerucut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.8; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.
 - b. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - c. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3;
 - d. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.8; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
 - e. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - f. Sub-Zona taman RT dengan kode RTH-6 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3;
 - g. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.8 dan Blok I.A.9; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
 - h. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.8 dan Blok I.A.9; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.



- i. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.8 dan Blok I.A.9; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.2.
- j. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.2.
- k. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.
- l. Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.9;
- m. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
- n. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.
- o. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1;
- p. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.9;
- q. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.9; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.3.
- r. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.

KABAG HUKUM	INSPEKTUR	KERALAUTAN	ASISTEN	SEKDA
				

- s. Sub Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - t. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.1.
 - u. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.8 dan Blok I.A.9;
 - v. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.8; dan
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.2.
 - w. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.9; dan
 - x. Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (7) Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1.
 - b. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.7; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
 - c. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.5; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1.
 - d. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4 dan Blok I.A.6;
 - e. Sub-Zona taman RT dengan kode RTH-6 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.7;



- f. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.9; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1.
- g. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, dan Blok I.A.7;
- h. Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.3.
- i. Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
- j. Sub-Zona hutan produksi tetap dengan kode HP terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.9; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.4.
- k. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
- l. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.5 dan Blok I.A.9; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.4.
- m. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.5 dan Blok I.A.9; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4.
- n. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4 terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.9; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.4.
- o. Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
- p. Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.5; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1.
- q. Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok

KABAG HUKUM	INSPEKTOR	KORAN	INSISTEN	SEKDA
<i>Ah</i>	<i>g</i>	<i>A</i>	<i>f</i>	<i>ah</i>

- r. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.6;
- s. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4.
- t. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.5; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.
- u. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.7; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2.
- v. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.9; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3.
- w. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4.
- x. Sub Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.6; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1.

KABUPATEN	INSPEKTOR	KEPUSATKAN	ASISTEN	SEKDA
				

y. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan
2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.

z. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, dan Blok I.A.8;

aa. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.6, dan Blok I.A.7;

bb. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, dan Blok I.A.7; dan
2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.

cc. Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; dan
2. SWP I.B pada Blok I.B.2.

dd. Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;

ee. Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;

ff. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan

gg. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.

(8) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. untuk mendirikan, mengubah, dan/atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan yang bertampalan dengan ketentuan khusus terhadap setiap Sub-Zona

KABUPATEN	ASPEK	KELAS	ASISTEN	SEKDA
1	2	3	4	5

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi batas ketinggian yang telah ditetapkan pada kawasan keselamatan operasi penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. pengecualian terhadap ketentuan untuk mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, dan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan;
 2. memenuhi kajian khusus aeronautika; dan
 3. sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan.
- c. bangunan yang melebihi batasan wajib diinformasikan melalui pelayanan informasi aeronautika (*aeronautical information service*);
- d. untuk mendirikan bangunan baru di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan berupa kawasan pendekatan lepas landas harus memenuhi batas ketinggian dengan tidak melebihi kemiringan 1,6 % (satu koma enam persen) arah ke atas dan ke luar dimulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu;
- e. pada khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan berupa kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sampai jarak mendarat 1.100 (seribu seratus) meter dari ujung-ujung permukaan utama hanya digunakan untuk bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan benda tumbuh yang tidak membahayakan keselamatan operasi penerbangan dengan batas ketinggian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pada kawasan keselamatan operasi penerbangan berupa kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan

KADAG HUKUM	INSPEKTORAT	tidak diperkenanka	KAPALADKAD	ASISTEN	SERDA
A	L	S	f	A	

dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. untuk memanfaatkan ruang darat dan/atau udara disetiap kawasan yang ditetapkan dalam Peraturan ini, harus mematuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
2. tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
3. tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
4. tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara;
5. tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara; dan
6. batas ketinggian gedung/bangunan pada kawasan keselamatan operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. ketentuan lebih lanjut terkait pemanfaatan Sub-Zona pada kawasan keselamatan operasi penerbangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

KADAG NUKUN	INSPEKTORAT	KAPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
				

Pasal 55

- (1) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b terdapat di Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.8 dan Blok I.A.9;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
- (2) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. lahan pertanian tanaman pangan yang ditetapkan merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dilarang untuk dialihfungsikan;
 - b. alih fungsi hanya dapat dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau bencana alam;
 - c. setiap orang yang melakukan alih fungsi pada lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan di luar ketentuan yang berlaku wajib mengembalikan keadaan tanah lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan seperti keadaan semula;
 - d. alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum terbatas pada kepentingan umum dengan jenis kegiatan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - e. dalam hal alih fungsi lahan pertanian pangan Berkelanjutan dilakukan karena terjadi bencana, lahan pengganti wajib disediakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
 - f. pemilik lahan dan penggarap yang mempertahankan lahannya diberi insentif oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah melalui skema program usaha pertanian modern; dan

KABAG HUKUM	INSPEKTORAT	KEPALA BPKAD	ASISTEN	SEKDA
Ah	2	8	f	pk

- g. ketentuan lebih lanjut mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 56

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c meliputi:
- kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
 - kawasan rawan bencana abrasi tingkat tinggi; dan
 - kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
 - Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3;
 - Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;
 - Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
 - Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3;
 - Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU -2 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3;

KABAGHUKUM	INSPEKTORAT	KEPALA BIDANG	ASISTEN	SEKDA
				

- h. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3;
 - i. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
 - j. Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
- a. konstruksi bangunan harus mengikuti standar bangunan tahan banjir;
 - b. apabila terdapat pembangunan baru maka lantai bangunan harus lebih tinggi dari permukaan tanah;
 - c. sarana dan prasarana minimal untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air sebesar 1 (satu) meter per detik;
 - d. wajib dilengkapi dengan sistem peringatan dini (*early warning system*) dan jalur evakuasi bencana;
 - e. bangunan harus dilengkapi dengan sumur resapan dan/atau lubang biopori; dan
 - f. badan air yang berada pada kawasan rawan bencana banjir dan banjir bandang dapat dilengkapi dengan bangunan dan jaringan pengendalian banjir.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana abrasi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - c. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - d. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;

KABAG HUKUM	INSPEKTORAT	KEPALA UPAD	ASISTEN	SEKDA
				

- e. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.3.
 - f. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan abrasi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:
- a. menyediakan bangunan pelindung pantai untuk melindungi pemanfaatan ruang pada Zona Budi Daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pembangunan dan pemanfaatan pada Zona Budi Daya seperti penyediaan sarana dan prasarana perlu mempertimbangkan karakteristik biofisik berupa kondisi morfologi pantai dan material penyusun pantai; dan
 - c. ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan rawan abrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
- a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
 - b. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - c. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.2.

KABUPATEN	INSPEKTORAT	KEPALA DAERAH	ASISTEN	SEKDA
<i>A</i>	<i>L</i>	<i>A</i>	<i>f</i>	<i>a</i>

- d. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4 dan Blok I.A.6;
- e. Sub-Zona taman RT dengan kode RTH-6 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;
- f. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2;
- g. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.6;
- h. Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2;
- i. Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
- j. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2;
- k. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2;
- l. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.2.
- m. Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
- n. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- o. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.6;
- p. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.6;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- q. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode

R-4 terdapat di:

KADAG HUKUM	INSPEKTORAT	KEPALA BIDANG	ASISTEN	SEKDA
				

1. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.1;
- r. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
- s. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.2.
- t. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- u. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.6; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1;
- v. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- w. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.6;
- x. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.6;
- y. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.6; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.2.

z. Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di:

KABAG HUKUM	INSPEKTORAT	KEPALA BIDANG	ASISTEN	SEKDA
				

1. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- aa. Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; dan
 - bb. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (7) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sebagai berikut:
- a. pembangunan hunian diarahkan dengan bangunan minimal 2 (dua) lantai atau lebih dengan elevasi lantai dasar setinggi muka air laut;
 - b. wajib menyediakan jalur evakuasi bencana, titik kumpul evakuasi, dan fasilitas penunjuk arah;
 - c. ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (8) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 57

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d berupa tempat evakuasi sementara meliputi:
- a. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.5; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1.
 - b. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.9.
- (2) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai

berikut:

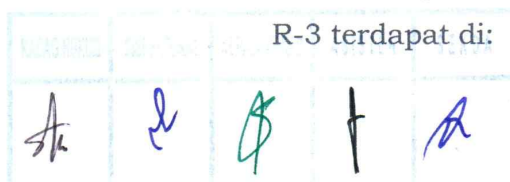
KABUPATEN	INSPEKTORAT	KEPANTUN	ASISTEN	SEKDA
				

- a. lokasi tempat evakuasi sementara dapat diintegrasikan dengan RTH, lapangan olahraga, tempat parkir dan lahan yang dimiliki oleh pemerintah daerah/milik umum;
 - b. dapat dikembangkan lebih lanjut dengan tidak mengganggu fungsi sebagai tempat evakuasi sementara; dan
 - c. ketentuan lebih lanjut mengenai tempat evakuasi sementara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 58

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e meliputi:
- a. sempadan pantai;
 - b. sempadan sungai;
 - c. sempadan mata air; dan
 - d. sempadan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 - b. Sub-Zona perikanan tangkap dengan kode IK-1 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - c. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2;
 - d. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - e. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode

R-3 terdapat di:



1. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan I.B.2; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.2.
- f. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
- g. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.
- h. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
- i. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
- j. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
- k. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2.
- l. Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
- m. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya air secara optimal dengan ketentuan menjaga kelestarian fungsi sempadan pantai;
 - b. pemanfaatan ruang kawasan sempadan pantai harus melakukan pengamanan pantai secara efektif dan efisien;
 - c. pembangunan pengaman pantai harus melakukan studi kelayakan dan mempertimbangkan:

KABUPATEN	KORPORASI	KEMAHKAMAN	ASISTEN	SEKDA
				

1. kelestarian sumber daya pantai dan komponen alami lingkungan pantai yang ada;
 2. dampak lingkungan yang ditimbulkan;
 3. kondisi sosial ekonomi masyarakat;
 4. peraturan perundang-undangan yang terkait pengaman pantai;
 5. kondisi politik dan kelembagaan; dan
 6. estetika atau keindahan.
- d. pemilihan alternatif pengaman pantai dapat dilakukan berupa:
1. perlindungan buatan seperti struktur lunak, struktur keras dan kombinasi antara struktur lunak dan struktur keras;
 2. perlindungan alami seperti perlindungan hutan/tanaman mangrove, gumuk pasir, terumbu karang, dan cemara pantai; dan
 3. adaptasi terhadap penyesuaian perubahan alam, penurunan risiko dampak yang mungkin terjadi, dan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam.
- e. wajib melakukan kegiatan pemeliharaan terhadap bangunan pengaman pantai, alur muara sungai, dan lingkungan pantai; dan
- f. ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan pantai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.3;
 - b. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.8; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
 - c. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan

PASAGHUNUN	INSEKSI	KELARPU	ANSTEN	SEKDA
sk	2	3	1	10

2. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.
 - d. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - e. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.8;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.3.
 - f. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 1. SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.1.
 - g. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - h. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.2.
 - i. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
 - j. Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (5) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya air secara optimal dengan ketentuan menjaga kelestarian fungsi sempadan sungai;
 - b. pemanfaatan kawasan sempadan sungai dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk:
 1. bangunan prasarana sumber daya air;
 2. fasilitas jembatan dan dermaga;
 3. jalur pipa das dan air minum;

KABUPATEN	DISPERTUM	KEMALU	ASISTEN	SEKDA
				

4. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
 5. kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai; dan
 6. bangunan ketenagalistrikan.
- c. untuk pemanfaatan kawasan sempadan sungai yang bertampalan dengan Sub-Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diwajibkan membangun tanggul untuk kepentingan pengendali banjir;
 - d. dalam hal terdapat bangunan pada kawasan sempadan sungai maka bangunan tersebut dinyatakan dalam *status quo* dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai; dan
 - e. ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan sungai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (6) Ketentuan khusus kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - b. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (7) Ketentuan khusus sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya air secara optimal dengan ketentuan menjaga kelestarian fungsi mata air;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan pertanian dengan tetap menjaga kelestarian fungsi mata air;
 - c. diperbolehkan membangun sarana dan prasarana pendukung pengelolaan dan pemanfaatan fungsi mata air;
 - d. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan yang bersifat permanen; dan
 - e. tidak menyebabkan pencemaran mata air.

KABUPATEN	INSPEKTUR	KORPORASI	ASISTEN	SEKDA
				

- (8) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - b. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.9;
 - c. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.8 dan Blok I.A.9; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.2.
 - d. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.8; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.2.
 - e. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.5, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4.
 - f. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;
 - g. Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 - h. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.9; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4.
 - i. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.5;
 - j. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - k. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.8; dan
 - l. Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.

KADAG BUKUM	DISPERTUM	KEMALAMPO	ASISTEN	SEKDA
				

(9) Ketentuan khusus sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan sebagai berikut:

- a. lapangan terbuka atau daerah terbuka minimal 8,5 (delapan koma lima) meter, jarak bebas minimum vertikal dihitung dari konduktor ke permukaan bumi atau permukaan jalan;
- b. daerah dengan keadaan tertentu berupa bangunan, jembatan minimal 5,0 (lima) meter, jarak bebas minimum vertikal dihitung dari konduktor ke titik tertinggi/terdekatnya;
- c. daerah dengan keadaan tertentu berupa tanaman/tumbuhan, hutan perkebunan minimal 5,0 (lima) meter, jarak bebas minimum vertikal dihitung dari konduktor ke titik tertinggi/terdekatnya;
- d. daerah dengan keadaan tertentu berupa jalan/jalan raya minimal 9,0 (sembilan) meter, jarak bebas minimum vertikal dihitung dari konduktor ke permukaan bumi atau permukaan jalan/rel;
- e. daerah dengan keadaan tertentu berupa lapangan umum minimal 13,5 (tiga belas koma lima) meter, jarak bebas minimum vertikal dihitung dari konduktor ke permukaan bumi atau permukaan jalan;
- f. daerah dengan keadaan tertentu berupa saluran udara tegangan tinggi (SUTT), saluran udara tegangan menengah (SUTM), saluran udara komunikasi, antena, minimal 4,0 (empat) meter, jarak bebas minimum vertikal dihitung dari konduktor ke titik tertinggi/terdekatnya; dan
- g. ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan ketenagalistrikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi

KAWASAN	KELOMPOK	KAWASAN	KAWASAN	KAWASAN
A	B	C	D	E

skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 59

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf f berupa ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan RTR dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.
- (3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (4) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RDTR;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wakil Bupati	Wakil Ketua DPRD	Ketua DPRD	Asisten	Bendahara
Ak	l	q	f	m

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 60

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, instansi vertikal bidang pertanahan, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 61

- (1) Jangka waktu RDTR Perkotaan Biau adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Perkotaan Biau dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan

KABUPATEN	KOTA	KABUPATEN	KOTA	SEKDA
				

dengan undang-undang; atau

d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati tentang RDTR Perkotaan Biau dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
- penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati tentang RDTR Perkotaan Biau dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR berlaku ketentuan:

- izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- Pemanfaatan Ruang di WP Perkotaan Biau yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.

RUMAH KONGRES	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA STAF	
KORDEKORAT	
KASABUTUM	

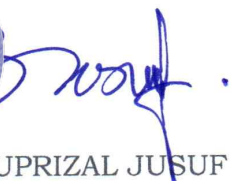
Ditetapkan di Buol
pada tanggal 6 Februari 2024


PJ BUPATI BUOL

M. MUCHLIS

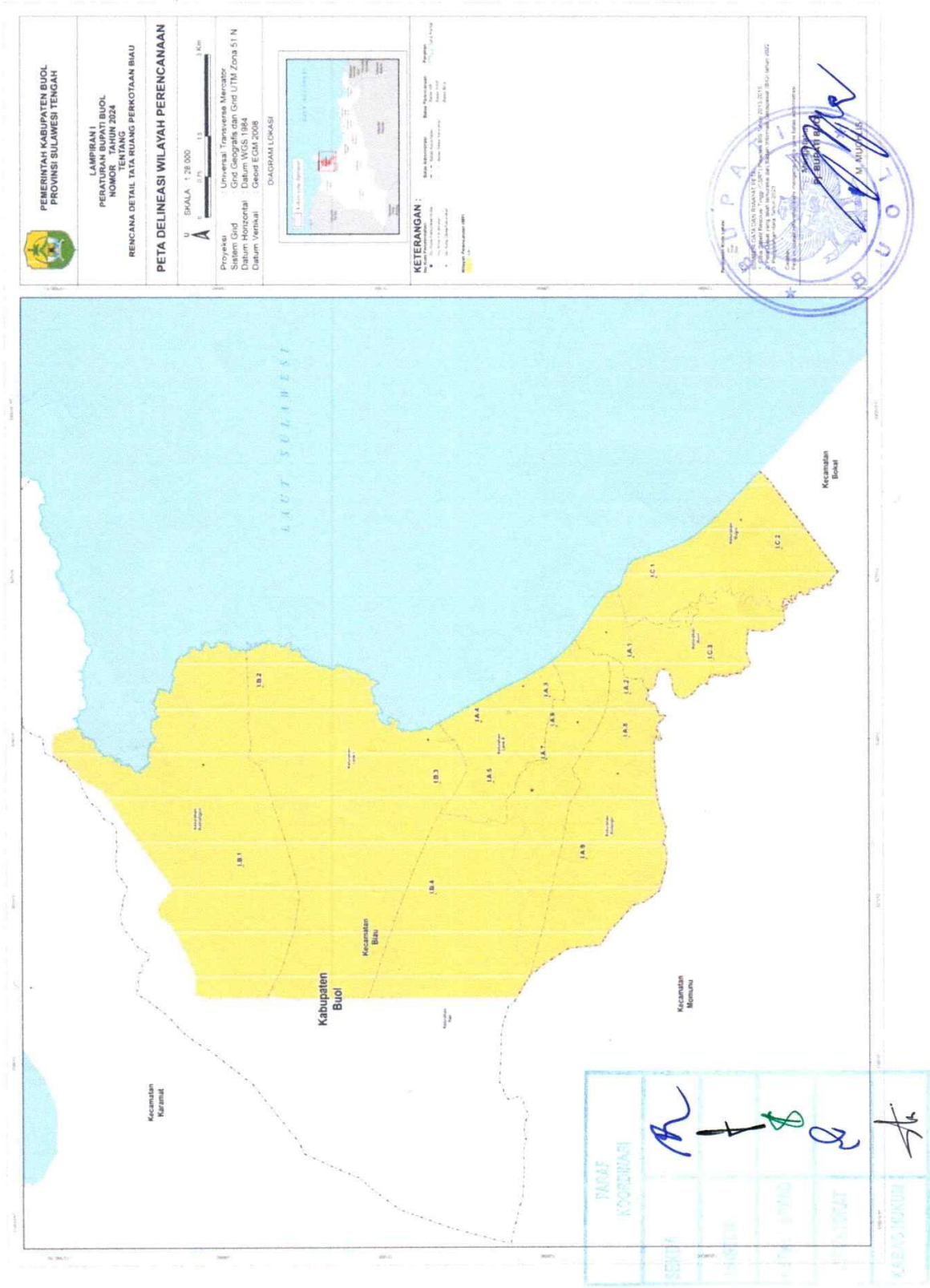
Diundangkan di Buol
pada tanggal 6 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUOL,

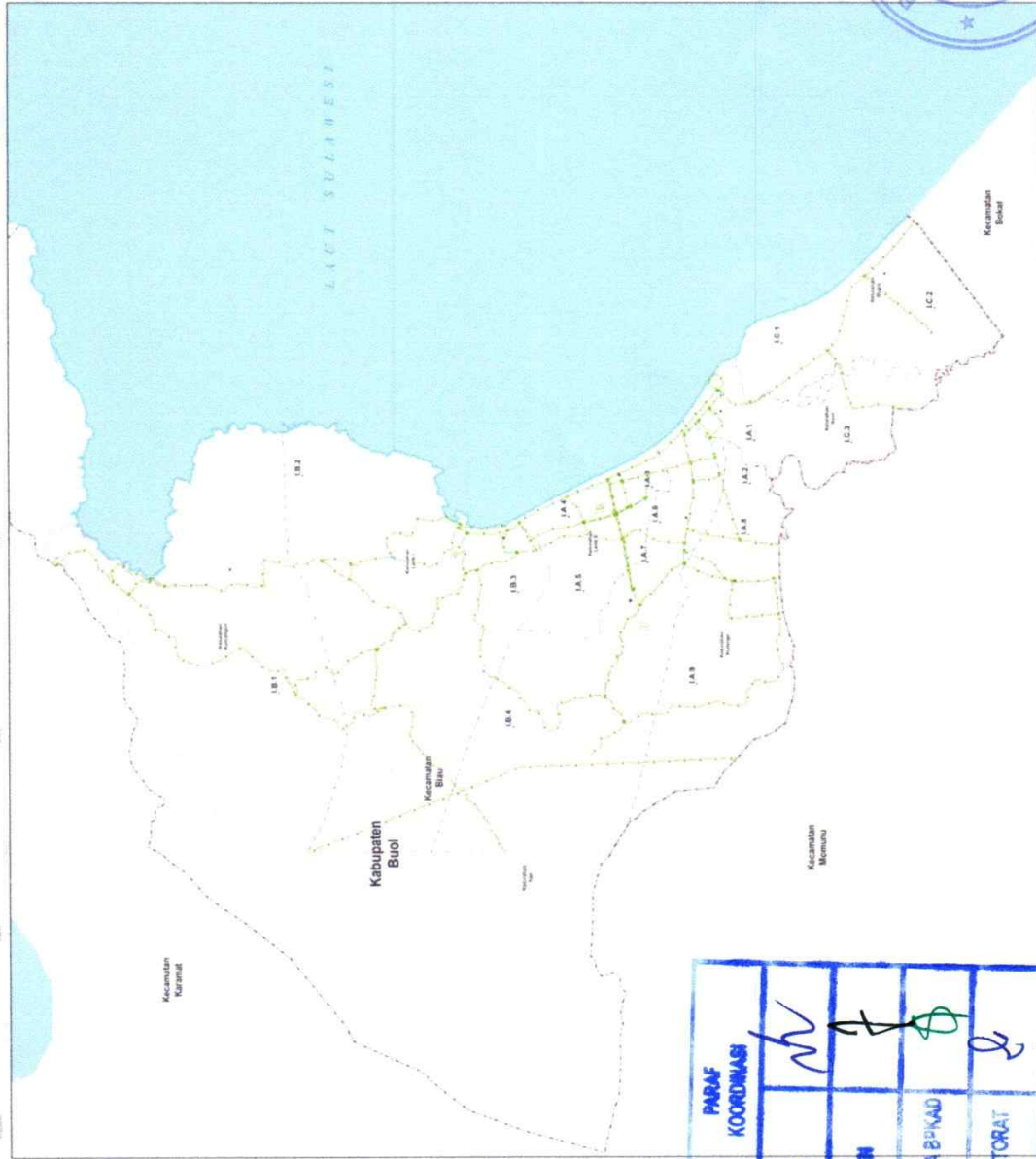

MOHAMMAD SUPRIZAL JUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2024 NOMOR 135

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BUOL NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN BIAU



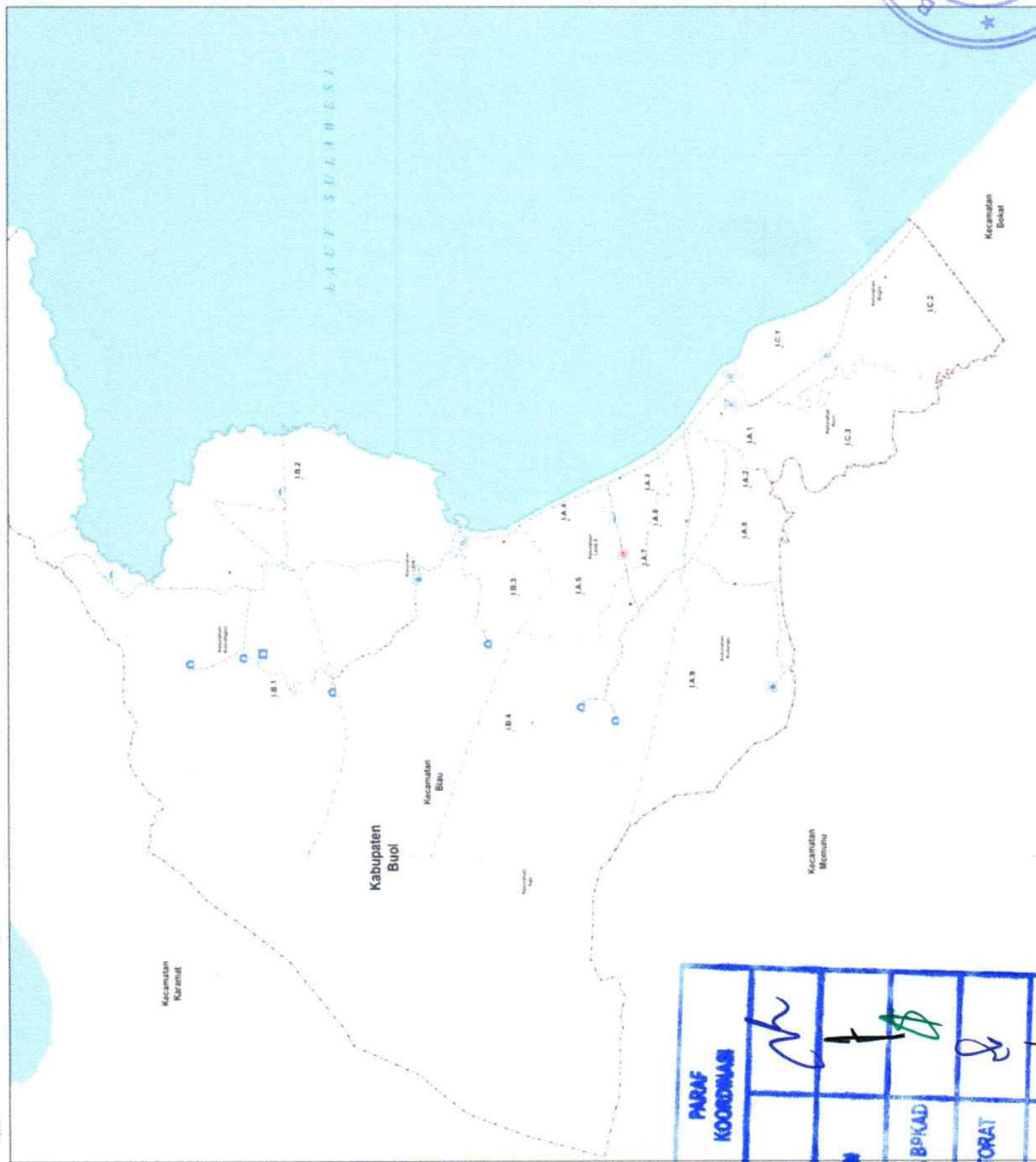
[illegible]

[illegible]

PARAF KORDINASI				
SEKDA				
ASISTEN				
KAPALA BAKAD				
INSPEKTORAT				
KABAG HUKUM				

1. PROSEDUR
 2. PROSEDUR
 3. PROSEDUR
 4. PROSEDUR
 5. PROSEDUR
 6. PROSEDUR
 7. PROSEDUR
 8. PROSEDUR
 9. PROSEDUR
 10. PROSEDUR
 11. PROSEDUR
 12. PROSEDUR
 13. PROSEDUR
 14. PROSEDUR
 15. PROSEDUR
 16. PROSEDUR
 17. PROSEDUR
 18. PROSEDUR
 19. PROSEDUR
 20. PROSEDUR
 21. PROSEDUR
 22. PROSEDUR
 23. PROSEDUR
 24. PROSEDUR
 25. PROSEDUR
 26. PROSEDUR
 27. PROSEDUR
 28. PROSEDUR
 29. PROSEDUR
 30. PROSEDUR
 31. PROSEDUR
 32. PROSEDUR
 33. PROSEDUR
 34. PROSEDUR
 35. PROSEDUR
 36. PROSEDUR
 37. PROSEDUR
 38. PROSEDUR
 39. PROSEDUR
 40. PROSEDUR
 41. PROSEDUR
 42. PROSEDUR
 43. PROSEDUR
 44. PROSEDUR
 45. PROSEDUR
 46. PROSEDUR
 47. PROSEDUR
 48. PROSEDUR
 49. PROSEDUR
 50. PROSEDUR
 51. PROSEDUR
 52. PROSEDUR
 53. PROSEDUR
 54. PROSEDUR
 55. PROSEDUR
 56. PROSEDUR
 57. PROSEDUR
 58. PROSEDUR
 59. PROSEDUR
 60. PROSEDUR
 61. PROSEDUR
 62. PROSEDUR
 63. PROSEDUR
 64. PROSEDUR
 65. PROSEDUR
 66. PROSEDUR
 67. PROSEDUR
 68. PROSEDUR
 69. PROSEDUR
 70. PROSEDUR
 71. PROSEDUR
 72. PROSEDUR
 73. PROSEDUR
 74. PROSEDUR
 75. PROSEDUR
 76. PROSEDUR
 77. PROSEDUR
 78. PROSEDUR
 79. PROSEDUR
 80. PROSEDUR
 81. PROSEDUR
 82. PROSEDUR
 83. PROSEDUR
 84. PROSEDUR
 85. PROSEDUR
 86. PROSEDUR
 87. PROSEDUR
 88. PROSEDUR
 89. PROSEDUR
 90. PROSEDUR
 91. PROSEDUR
 92. PROSEDUR
 93. PROSEDUR
 94. PROSEDUR
 95. PROSEDUR
 96. PROSEDUR
 97. PROSEDUR
 98. PROSEDUR
 99. PROSEDUR
 100. PROSEDUR

[illegible]



PARAF KOORDINASI					
SEKRETA					
ASISTEN					
KETUA BKAD					
INSPEKTORAT					
KABAG HUKUM					

(Handwritten signature)

[illegible]

RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN DRAINASE

KETERANGAN

1. Garis Drainase

2. Saluran Drainase

3. Struktur Drainase

RENCANA STRUKTUR RUANG

1. Garis Drainase

2. Saluran Drainase

3. Struktur Drainase

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN

2. DASAR HUKUM

3. TUJUAN DAN Maksud

4. RUANG LINGKUP

5. METODE PENELITIAN

6. HASIL PENELITIAN

7. PENUTUP

DAFTAR GAMBAR

1. Peta Lokasi Kabupaten Buol

2. Peta Rencana Struktur Ruang

3. Peta Rencana Jaringan Drainase

DAFTAR TABEL

1. Tabel Data Drainase

2. Tabel Data Struktur Drainase

REVISI

No	Revisi	Uraian	Tgl
1	1	Revisi	10/10/2023

RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN DRAINASE

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN

2. DASAR HUKUM

3. TUJUAN DAN Maksud

4. RUANG LINGKUP

5. METODE PENELITIAN

6. HASIL PENELITIAN

7. PENUTUP

DAFTAR GAMBAR

1. Peta Lokasi Kabupaten Buol

2. Peta Rencana Struktur Ruang

3. Peta Rencana Jaringan Drainase

DAFTAR TABEL

1. Tabel Data Drainase

2. Tabel Data Struktur Drainase

REVISI

No	Revisi	Uraian	Tgl
1	1	Revisi	10/10/2023

RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN DRAINASE

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN

2. DASAR HUKUM

3. TUJUAN DAN Maksud

4. RUANG LINGKUP

5. METODE PENELITIAN

6. HASIL PENELITIAN

7. PENUTUP

DAFTAR GAMBAR

1. Peta Lokasi Kabupaten Buol

2. Peta Rencana Struktur Ruang

3. Peta Rencana Jaringan Drainase

DAFTAR TABEL

1. Tabel Data Drainase

2. Tabel Data Struktur Drainase

REVISI

No	Revisi	Uraian	Tgl
1	1	Revisi	10/10/2023

[illegible]

PERATURAN BUPATI BUOL NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN BIAU

TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA			WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	TP-1	TP-2				TP-3	TP-4	TP-5
I	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG														
A	PERWUJUDAN RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN														
A.1	PUSAT PELAYANAN KOTA/KAWASAN PERKOTAAN BIAU														
A.1.1	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya														
A.1.1.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Di Daerah Kabupaten														
1)	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten	SWP I.A Blok I.A.3	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-								
2)	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	SWP I.A Blok I.A.3	APBD Kabupaten, Swasta	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Swasta								
3)	Penataan Bangunan dan Lingkungan	SWP I.A Blok I.A.3	APBD Kabupaten Swasta	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Swasta								
4)	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	SWP I.A Blok I.A.3	APBD Kabupaten Swasta	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Swasta								
A.2	PERWUJUDAN SUB PUSAT PELAYANAN KOTA/KAWASAN PERKOTAAN														
A.2.1	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya														
A.2.1.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten														
1)	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten	- SWP I.B Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-								
2)	Supervisi Penataan/ Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	- SWP I.B Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-								
3)	Penataan Bangunan dan Lingkungan	- SWP I.B Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-								
4)	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	- SWP I.B Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-								
							KABANG HURUM	INSPEKTORAT	KEMALAH UPKAD	ASISTEN					

[illegible]

[illegible]

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA			WAKTU PELAKSANAAN									
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
									1	2	3	4	5			
14)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Kelinci	SWP I.A Blok I.A.8 dan Blok I.A.9	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
15)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Zebra	SWP I.A Blok I.A.8	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
16)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Pnang	SWP I.A Blok I.A.9	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
17)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Kulango 1	SWP I.A Blok I.A.9	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
18)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Kulango 2	SWP I.A Blok I.A.9	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
19)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Kulango 3	SWP I.A Blok I.A.9	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
20)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Kulango 4	SWP I.A Blok I.A.9	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
21)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Unta	SWP I.A Blok I.A.9	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
22)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Tirtaria 1	SWP I.A Blok I.A.9	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
23)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Tirtaria 2	SWP I.A Blok I.A.9	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
24)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Kumaligon 1	SWP I.B Blok I.B.1	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
25)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Kumaligon 2	SWP I.B Blok I.B.1	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
26)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Kumaligon 3	SWP I.B Blok I.B.1	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
27)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Tontoyong 1	SWP I.B Blok I.B.3	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
28)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Tontoyong 2	SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.4	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
29)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Tontoyong 3	SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.4	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									

KABUPATEN KULANGO	INDONESIA	SEKOLAH	ISISTEN	SEKOLAH

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
									2024	2025	2026	2027	2028			
B.7.1.1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap															
1)	Pengembangan dan penyediaan sarana dan prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan Kumaligon	SWP I.B Blok I.B.1	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-									
2)	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	SWP I.B Blok I.B.1	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-									
C	PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN PRASARANA															
C.1	PERWUJUDAN JARINGAN ENERGI															
C.1.1	INFRASTRUKTUR PEMBANGKITAN LISTRIK DAN SARANA PENDUKUNG															
C.1.1.1	PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL (PLTD)															
1)	Peningkatan kapasitas produksi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Leok	SWP I.B Blok I.B.2	APBN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, PT. PLN	-	-	Swasta									
C.1.2	JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK ANTARSISTEM															
C.1.2.1	SALURAN UDARA TEGANGAN TINGGI (SUTT)															
1)	Pengembangan dan peningkatan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Leok - Tolinggula	- SWP I.A - SWP I.B - SWP I.C	APBN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, PT. PLN	-	-	Swasta									
2)	Pembangunan dan Pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Tolitoli - Leok	SWP I.B	APBN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, PT. PLN	-	-	Swasta									
C.1.3	JARINGAN DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK															
C.1.3.1	SALURAN UDARA TEGANGAN MENENGAH (SUTM)															
C.1.3.1.1	Program Peningkatan jaringan Distribusi Tenaga Listrik															
1)	Pengembangan dan Peningkatan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTM)	- SWP I.A - SWP I.B - SWP I.C	APBN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, PT. PLN	-	-	Swasta									
C.1.4	GARDU LISTRIK															
C.1.4.1	GARDU INDUK															
1)	Instalasi Gardu Induk Leok/Buol + 2 LB arah Tolinggula	SWP I.B Blok I.B.1	APBN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, PT. PLN	-	-	Swasta									
C.1.4.2	GARDU DISTRIBUSI															
1)	Instalasi dan Pemeliharaan Gardu Distribusi	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4,	APBN, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,	-	-	Swasta									
				KABUPATEN	KABUPATEN	KABUPATEN	KABUPATEN	KABUPATEN	KABUPATEN	KABUPATEN	KABUPATEN	KABUPATEN	KABUPATEN	KABUPATEN	KABUPATEN	KABUPATEN
				ASISTEN	ASISTEN	ASISTEN	ASISTEN	ASISTEN	ASISTEN	ASISTEN	ASISTEN	ASISTEN	ASISTEN	ASISTEN	ASISTEN	ASISTEN
				ASISTEN	ASISTEN	ASISTEN	ASISTEN	ASISTEN	ASISTEN	ASISTEN	ASISTEN	ASISTEN	ASISTEN	ASISTEN	ASISTEN	ASISTEN
				ASISTEN	ASISTEN	ASISTEN	ASISTEN	ASISTEN	ASISTEN	ASISTEN	ASISTEN	ASISTEN	ASISTEN	ASISTEN	ASISTEN	ASISTEN

MANAJEMEN	INSPEKSI	KAPALABIMAD	ASISTEN	SEKDA
<i>fl</i>	<i>2</i>	<i>Φ</i>	<i>T</i>	<i>fl</i>

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN									
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5	
									1	2	3	4	5				
		Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3		PT. PLN				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043	
C.2	PERWUJUDAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI																
C.2.1	JARINGAN TETAP																
C.2.1.1	Program Pengembangan Jaringan Tetap																
1)	Pengembangan jaringan serat optik Jalur Barat - Utara yaitu sepanjang Santiagi - Kotaraya - Tolitoli – Buol	- SWP I.A - SWP I.B	APEN, APBD Kabupaten	Kementerian Komunikasi Dan Informatika	-		Dinas Komunikasi dan Informatika	-									
2)	Pengembangan jaringan serat optik	- SWP I.A - SWP I.B - SWP I.C	APEN, APBD Kabupaten	Kementerian Komunikasi Dan Informatika	-		Dinas Komunikasi dan Informatika	-									
C.2.2	JARINGAN BERGERAK SELULER																
C.2.2.1	MENARA BASE TANSCEIVER STATION (BTS)																
1)	Peningkatan dan Peningkatan Menara Base Transceiver Station (BTS) mandiri dan menara BTS bersama	SWP I.A Blok I.A.4 dan Blok I.A.9 SWP I.B Blok I.B.3	APEN APBD	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-		Dinas Komunikasi dan Informatika	Swasta									
C.3	PERWUJUDAN JARINGAN SUMBER DAYA AIR																
C.3.1	SISTEM JARINGAN IRIGASI																
C.3.1.1	JARINGAN IRIGASI PRIMER																
C.3.1.1.1	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten																
1)	Peningkatan dan/atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi Biau	SWP I.A SWP I.B SWP I.C	APBD	-	-		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
2)	Peningkatan dan/atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi Botakio Buol	SWP I.A SWP I.C	APBD	-	-		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
3)	Peningkatan dan/atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi Botakio Popugu	SWP I.A	APBD	-	-		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
C.3.1.2	JARINGAN IRIGASI SEKUNDER																
C.3.1.2.1	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten																
1)	Peningkatan dan/atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kulango	SWP I.A	APBD Kabupaten	-	-		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									

KABUPATEN	INSPEKSI	KELOMPOK	ASISTEN	SEKDA

[Handwritten signatures and initials]

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN										
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5		
									2024	2025	2026	2027	2028				2029	
2)	Peningkatan dan/atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi Biau	SWP I.C	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-											
3)	Peningkatan dan/atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bugis	SWP I.C	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-											
C.2.1.3	JARINGAN IRIGASI TERSIER																	
C.3.1.3.1	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Tersier pada Daerah Irigasi Tersier																	
1)	Peningkatan dan/atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi Buol	SWP I.A	APBD Kabupaten, Swasta	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-											
2)	Peningkatan dan/atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kumaligon	SWP I.B	APBD Kabupaten, Swasta	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-											
3)	Peningkatan dan/atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kulango	SWP I.A	APBD Kabupaten, Swasta	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-											
4)	Peningkatan dan/atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bugis	SWP I.C	APBD Kabupaten, Swasta	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-											
C.3.2	SISTEM PENGENDALIAN BANJIR																	
C.3.2.1	JARINGAN PENGENDALIAN BANJIR																	
C.3.2.1.1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
1)	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	SWP I.A	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-											
2)	Rehabilitasi jaringan pengendalian banjir	SWP I.A	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-											
3)	Pengembangan jaringan pengendalian banjir	SWP I.A	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-											
C.3.2.2	BANGUNAN PENGENDALIAN BANJIR																	
1)	Rehabilitasi Bangunan Pengendalian Banjir	SWP I.A Blok I.A.2 dan Blok I.A.8	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-											
2)	Peningkatan Bangunan Pengendalian Banjir	SWP I.A Blok I.A.2 dan Blok I.A.8	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-											
C.3.3	BANGUNAN SUMBER DAYA AIR																	
C.3.3.1	PRASARANA IRIGASI																	

KABUPATEN	KABUPATEN	KABUPATEN	KABUPATEN	KABUPATEN
ASISTEN	ASISTEN	ASISTEN	ASISTEN	ASISTEN
SEKDA	SEKDA	SEKDA	SEKDA	SEKDA

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN									
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5	
									2024	2025	2026	2027	2028				2029
C.3.3.1.1	Pengelolaan Bangunan SDA pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten																
1)	Pengembangan dan Pemeliharaan Prasarana Irigasi Bendung Kulango	SPW I.A Blok I.A.9	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
C.4	PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN AIR MINUM																
C.4.1	JARINGAN PERPIPAAN																
C.4.1.1	UNIT AIR BAKU																
C.4.1.1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten																
1)	Pengembangan bangunan pengambil air baku	- SWP I.A Blok I.A.9 - SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.4	APBN APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
2)	Pengembangan jaringan transmisi air baku	SWP I.A SWP I.B	APBN APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
C.4.1.2	UNIT PRODUKSI																
C.4.1.2.1	Pengembangan Unit Produksi																
1)	Pengembangan instalasi produksi	- SWP I.A Blok I.A.9 - SWP I.B Blok I.B.2	APBN APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
C.4.1.3	UNIT DISTRIBUSI																
C.4.1.3.1	Pengembangan Unit Distribusi																
1)	Pengembangan jaringan distribusi pembagi	- SWP I.A - SWP I.B - SWP I.C	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
2)	Pemeliharaan jaringan distribusi pembagi	- SWP I.A - SWP I.B - SWP I.C	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
C.4.1.4	UNIT PELAYANAN																
C.4.1.4.1	Pengembangan Unit Pelayanan																
1)	Pembangunan sambungan langsung	- SWP I.A Blok I.A.4 - SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2	APBN APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
2)	Pembangunan hidran umum	- SWP I.A Blok I.A.1 - SWP I.B Blok I.B.2 - SWP I.C Blok I.C.1	APBN APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
3)	Pengelolaan dan pengoperasian hidran kebakaran	SWP I.A Blok I.A.5	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pemadam Kebakaran	-										
C.4.2	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN																

ASAHAN

KEKANTORAN

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

KEPADA

<

KABUPATEN	INSPEKTUR	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKJIA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
									2024	2025	2026	2027	2028			
C.4.2.1	BANGUNAN PENANGKAP MATA AIR															
1)	Pembangunan dan pengoperasian bangunan penangkap mata air	SWP I.B Blok I.B.1	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
C.5	PERWUJUDAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)															
C.5.1	SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK SETEMPAT															
C.5.1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota															
1)	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Sirategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik setempat	SWP I.A Blok I.A.1	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
2)	Pembangunan dan Pengembangan Sub-Sistem Pengelolaan Setempat	SWP I.A Blok I.A.1	APBN APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
C.5.2	SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK TERPUSAT															
C.5.2.1	SUBSISTEM PENGELOLAHAN TERPUSAT															
C.5.2.1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota															
1)	Pembangunan IPAL skala Kawasan tertentu/permukiman	SWP I.A Blok I.A.4 dan Blok I.A.7	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
2)	Pengawasan dan pemeliharaan IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	SWP I.A Blok I.A.4 dan Blok I.A.7	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
C.5.3	SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)															
C.5.3.1	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)															
1)	Pembangunan dan pengoperasian Sistem Pengelolaan Air Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	SWP I.A Blok I.A.3 dan Blok I.A.4	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
C.6	PERWUJUDAN RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN															
C.6.1	TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA (TPS)															
C.6.1.1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten															
1)	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Sirategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.6; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.3; - SWP I.C Blok I.C.1	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup	-									
2)	Pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2,	APBD Kabupaten,	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Swasta									

DISKUSI	DISKUSI	DISKUSI	DISKUSI	DISKUSI	DISKUSI
1	2	3	4	5	6

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
									1	2	3	4	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			APBD Kabupaten, Swasta																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

KABAG HUKUM	INSPEKTORAT	KEPALA OPD	ASISTEN	SEDA
				

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN																				
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5												
									1	2	3	4	5															
	sementara Lapangan Terminal Penumpang Leok									2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2043										
C.8.3	JARINGAN PEJALAN KAKI																											
C.8.3.1	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan																											
1)	Penataan dan/atau Pemeliharaan Jalur Pejalan Kaki Jln. M.A. TURUNGKU (BUOL)	SWP I.A	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	-	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-																					
2)	Penataan dan/atau Pemeliharaan Jalur Pejalan Kaki Jalan Batalipu (Kota Buol)	SWP I.A	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-																					
3)	Penataan dan/atau Pemeliharaan Jalur Pejalan Kaki Jalan Zansibar (Kota Buol)	SWP I.A	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-																					
4)	Penataan dan/atau Pemeliharaan Jalur Pejalan Kaki ruas jalan BUOL - LAKUAN	SWP I.A SWP I.B	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-																					
C.8.4	PENGAMAN PANTAI																											
C.8.4.1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	SWP I.A SWP I.B	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-																					
1)	Peningkatan dan pemeliharaan bangunan Pengaman Pantai	SWP I.A SWP I.B	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-																					
II	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG																											
D	ZONA LINDUNG																											
D.1	PERWUJUDAN ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT DENGAN KODE PS																											
D.1.1	Program Pengaturan Pertanahan Di Wilayah Pesisir, Laut Dan Pulau																											
D.1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Kecil, Sempadan Pantai, Wilayah Perbatasan, dan Pulau Terpencil																											
1)	Identifikasi, Inventarisasi, dan Pengelolaan Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.8; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup	-																					
2)	Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.8; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup	-																					
<table><tr><td>KABANG HUKUM</td><td>INSPEKSI</td><td>KEPALA DINAS</td><td>ASISTEN</td><td>SEKDA</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			KABANG HUKUM	INSPEKSI	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA					
KABANG HUKUM	INSPEKSI	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA																								

KABANG HUKUM	INSPEKSI	KEPALA BIDANG	ASISTEN	SEKDA

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN									
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5	
									2024	2025	2026	2027	2028				2029
D.1.2 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)																	
D.1.2.1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten																	
1)	Pembangunan dan Peningkatan Tanggul Sungai	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.8; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
2)	Pembangunan dan Peningkatan Tanggul Pengaman Pantai	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.8; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
D.1.3 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang																	
D.1.3.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten																	
1)	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Pengaturan Hukum Bidang Penataan Ruang pada Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.8; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3	APBD Kabupaten	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-										
D.1.4 Program Pengelolaan Kelembagaan Hayati																	
D.1.4.1 Pengelolaan Kelembagaan Hayati Kabupaten																	
1)	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Kelembagaan Hayati Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.8; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	-										
2)	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau pada Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.8;	APBD Kabupaten, Swasta	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Swasta										
								KABUPATEN	INSPEKTORAT	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA					

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN										
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5		
									2024	2025	2026	2027	2028				2029	2030- 2034
D.2	PERWUJUDAN ZONA RUANG TERBUKA HIJAU DENGAN KODE RTH																	
D.2.1	SUB-ZONA TAMAN KOTA DENGAN KODE RTH-2																	
D.2.1.1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)																	
1)	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.7 - SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2	APBD Kabupaten, swasta	-	Dinas Lingkungan Hidup	Swasta												
2)	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati di Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, dan Blok I.A.7 - SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2	APBD Kabupaten, swasta	-	Dinas Lingkungan Hidup	Swasta												
D.2.2	SUB-ZONA TAMAN KECAMATAN DENGAN KODE RTH-3																	
D.2.2.1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)																	
1)	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3	SWP I.C Blok I.C.3	APBD Kabupaten, Swasta	-	Dinas Lingkungan Hidup	Swasta												
2)	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati di Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3	SWP I.C Blok I.C.3	APBD Kabupaten, Swasta	-	Dinas Lingkungan Hidup	Swasta												
D.2.3	Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4																	
D.2.3.1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)																	
1)	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Sub-Zona RTH Taman Kelurahan dengan kode RTH-4	- SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.8 - SWP I.B Blok I.B.1 - SWP I.C Blok I.C.2, dan Blok I.C.3	APBD Kabupaten, Swasta	-	Dinas Lingkungan Hidup	Swasta												
D.2.4	SUB-ZONA TAMAN RW DENGAN KODE RTH-5																	
D.2.4.1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)																	
1)	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Sub-Zona RTH Taman RW dengan kode RTH-5	- SWP I.A Blok I.A.4 dan Blok I.A.6; dan - SWP I.C Blok I.C.1	APBD Kabupaten, Swasta	-	Dinas Lingkungan Hidup	Swasta												
							KABANGKUN	INSPEKTOR	KEMALAMPUD	ASISTEN	SEKDA							

KABUPATEN	KABUPATEN	KABUPATEN	KABUPATEN	KABUPATEN	KABUPATEN
ASISTEN	ASISTEN	ASISTEN	ASISTEN	ASISTEN	ASISTEN
SEKDA	SEKDA	SEKDA	SEKDA	SEKDA	SEKDA

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA			WAKTU PELAKSANAAN									
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
									1	2	3	4	5			
D.2.5	SUB-ZONA TAMAN RT DENGAN KODE RTH-6															
D.2.5.1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)															
1)	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Sub-Zona RTH Taman RT dengan kode RTH-6	- SWP I.A Blok I.A.3 dan Blok I.A.7; - SWP I.C Blok I.C.3	APBD Kabupaten, Swasta	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Swasta									
D.2.6	SUB-ZONA PEMAKAMAN DENGAN KODE RTH-7															
D.2.6.1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)															
1)	Pengelolaan Pertamanan dan Pemakaman di Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7	- SWP I.A Blok I.A.8, Blok I.A.9 I.B.1 - SWP I.C Blok I.C.1, dan Blok I.C.2	APBD Kabupaten, Swasta	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Swasta									
D.2.7	SUB-ZONA JALUR HIJAU DENGAN KODE RTH-8															
D.2.7.1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)															
1)	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8	SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, dan Blok I.A.7	APBD Kabupaten, Swasta	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Swasta									
D.3	PERWUJUDAN ZONA CAGAR BUDAYA DENGAN KODE CB															
D.3.1	SUB-ZONA CAGAR BUDAYA DENGAN KODE CB															
D.3.1.1	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar budaya															
D.3.1.1.1	Penetapan dan pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota															
1)	Register Cagar Budaya	- SWP I.A Blok I.A.2 - SWP I.B Blok I.B.3	APBN APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	-	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Swasta									
2)	Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya	- SWP I.A Blok I.A.2 - SWP I.B Blok I.B.3	APBN APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	-	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Swasta									
3)	Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya	- SWP I.A Blok I.A.2 - SWP I.B Blok I.B.3	APBN APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	-	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Swasta									
D.3.1.2	Program Penataan Bangunan Gedung															
1)	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten	- SWP I.A Blok I.A.2 - SWP I.B Blok I.B.3	APBN APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	-	Pekerjaan Umum Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan										
D.4	PERWUJUDAN ZONA EKOSISTEM MANGROVE DENGAN KODE EM															
								KABANG HUKUM	INSPEKTORAT	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA				
									2	\$	1		nk			

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN									
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5	
									2024	2025	2026	2027	2028				2029
D.4.1	SUB-ZONA EKOSISTEM MANGROVE DENGAN KODE EM																
D.4.1.1	Program Pengelolaan Hutan																
D.4.1.1.1	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan																
1)	Rehabilitasi Mangrove di Luar Kawasan Hutan	SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Swasta										
D.4.1.2	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)																
D.4.1.2.1	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan hutan																
2)	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya di Sub-Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM	SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	-										
E	ZONA BUDI DAYA																
E.1	PERWUJUDAN ZONA HUTAN PRODUKSI DENGAN KODE KHP																
E.1.1	SUB-ZONA HUTAN PRODUKSI TETAP DENGAN KODE HP																
E.1.1.1	Program Pengelolaan hutan																
1)	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Sub-Zona Hutan Produksi dengan kode HP	- SWP I.A Blok I.A.9; - SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.4	APBN APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan	-	-										
2)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Sub-Zona Hutan Produksi dengan kode HP	- SWP I.A Blok I.A.9; - SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.4	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan	-	-										
3)	Pelaksanaan Pemanfaatan Hasil Hutan di Sub-Zona Hutan Produksi dengan kode HP	- SWP I.A Blok I.A.9; - SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.4	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan	-	Swasta										
4)	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	- SWP I.A Blok I.A.9; - SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.4	APBN APBD	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kehutanan	-	-										
E.2	PERWUJUDAN ZONA KAWASAN PERTANIAN DENGAN KODE P																
E.2.1	SUB-ZONA TANAMAN PANGAN DENGAN KODE P-1																
E.2.1.1	Program penyediaan dan pengembangan Sarana pertanian																
E.2.1.1.1	Pengembangan Prasarana Pertanian																
								KABANG HUKUM	INSTRUKSI	KEPALA SWAS	ASISTEN	SEKDA					
								A	2	8	1	Ar					

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN															
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBEDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBEDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5							
									2024	2025	2026	2027	2028				2029						
		- SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3																					
5)	Perencanaan dan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	- SWP I.A Blok I.A.1 - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	-	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan	-																
E.3.2.1.2	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	- SWP I.A Blok I.A.1 - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3	APBD Kabupaten	-	Dinas Perikanan		-																
1)	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																						
E.4	PERWUJUDAN ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK DENGAN KODE PTL																						
E.4.1	SUB-ZONA PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK DENGAN KODE PTL																						
E.4.1.1	Program Pengelolaan Lingkungan Pembangkit Tenaga Listrik																						
E.4.1.1.1	Penataan dan Pemanfaatan Ruang Zona Pembangkit Tenaga listrik																						
1)	Pengembangan dan peningkatan jaringan kapasitas pembangkit listrik	SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, PT. PLN	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	Swasta																
2)	Pembangunan dan Pengembangan Gardu Listrik pada Sub-Zona Pembangkit Tenaga Listrik dengan kode PTL	SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, PT. PLN	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	Swasta																
E.5	PERWUJUDAN ZONA PARWISATA DENGAN KODE W																						
E.5.1	SUB-ZONA PARWISATA DENGAN KODE W																						
E.5.1.1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata																						
E.5.1.1.1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten																						
1)	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten Sub-Zona Pariwisata dengan Kode W	- SWP I.A Blok I.A.5, Blok I.A.9 - SWP I.B Blok I.B.1	APBD Kabupaten, Swasta	-	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata		Swasta																
2)	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten Sub-Zona Pariwisata dengan Kode W	- SWP I.A Blok I.A.5, Blok I.A.9 - SWP I.B Blok I.B.1	APBD Kabupaten, Swasta	-	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata		Swasta																
E.5.1.1.2	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten																						
1)	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten pada Sub-Zona Pariwisata dengan Kode W	- SWP I.A Blok I.A.5, Blok I.A.9 - SWP I.B Blok I.B.1	APBD Kabupaten, Swasta	-	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata		Swasta																
																			WAKIL KEMENDAG	ASISTEN KEMENDAG	KEMENDAG	ASISTEN	SEKDA

KABUPATEN	INSPEKTUR	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA			WAKTU PELAKSANAAN									
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
									1	2	3	4	5			
2)	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten Sub-Zona Pariwisata dengan Kode W	- SWP I.A Blok I.A.5, Blok I.A.9 - SWP I.B Blok I.B.1	APBD Kabupaten, Swasta	-	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	Swasta	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043	
E.6	PERWUJUDAN ZONA PERUMAHAN DENGAN KODE R															
E.6.1	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI DENGAN KODE R-2															
E.6.1.1	Program Pengembangan Perumahan															
E.6.1.1.1	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten															
1)	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.6.	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-									
E.6.1.2	Program Kawasan Permukiman															
E.6.1.2.2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha															
1)	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Perumahan/ Pemugaran permukiman Kumuh	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.6.	APBD Kabupaten	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-										
2)	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.6.	APBD Kabupaten, Swasta	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Swasta										
3)	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.6.	APBD Kabupaten, Swasta	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Swasta										
E.6.1.3	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh															
E.6.1.1.3	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten															
1)	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.6.	APBD Kabupaten	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-										
2)	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.6.	APBD Kabupaten	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-										
E.6.1.4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)															
E.6.1.4.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan															
							KABANG HUKUM	INSPEKTORAT	REPLA SPADA	ASISTEN	SEKDA					
								8	9	1	M					

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN									
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBEDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBEDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5		
								1	2	3	4	5					
1)	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.6.	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043	
2)	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.6.	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-										
3)	Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.6.	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-										
E.6.1.5	Pengelolaan Keankaragaman Hayati Kabupaten																
1)	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi Dengan Kode R-2	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.6.	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	-										
E.6.2	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG DENGAN KODE R-3																
E.6.2.1	Program Kawasan Perumahan																
E.6.2.1.1	Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																
1)	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-										
2)	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-										
								KABAG HUKUM	INSPEKTUR	KAPALA BPMD	ASISTEN	SEKDA					
																	

KABUPATEN	INSPEKTOR	REPLA SPAD	ASISTEN	SEKDA

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN									
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5	
									2024	2025	2026	2027	2028				2029
E.6.2.2	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh																
E.6.2.2.1	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota																
1)	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	-	APBD Kabupaten	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-											
2)	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	-	APBD Kabupaten	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-											
E.6.2.3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)																
E.6.2.3.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan																
1)	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	-	APBD Kabupaten	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-											

WAKIL DAERAH	INSPESKTOR	RESPONSOR	ASISTEN	SEKDA
				

WAKIL DAERAH	ASISTEN	WAKIL DAERAH	ASISTEN
			

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA			WAKTU PELAKSANAAN									
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGKARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
									2025	2026	2027	2028	2029			
2)	Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.	APBN, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Swasta	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
E.6.2.4	Pengelolaan Keankaragaman Hayati Kabupaten															
1)	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang Dengan Kode R-3	- SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan - SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.	APBD Kabupaten	-	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
E.6.3	SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH DENGAN KODE R-4															
E.6.3.1	Program Kawasan Permukiman															
E.6.3.1.1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha															
1)	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	- SWP I.A Blok I.A.5; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; - SWP I.C Blok I.C.1	APBD Kabupaten	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
2)	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	- SWP I.A Blok I.A.5; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; - SWP I.C Blok I.C.1	APBD Kabupaten	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
E.6.3.2	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)															
								KABAG. HUKUM	INSPEKTUR	KEPALA BIDANG	ASISTEN	SEK. DIA				
																

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN									
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBEDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBEDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5	
									1	2	3	4	5				
E.6.3.2.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan																
1)	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	- SWP I.A Blok I.A.5; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; - SWP I.C Blok I.C.1	APBD Kabupaten	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-											
2)	Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat	- SWP I.A Blok I.A.5; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; - SWP I.C Blok I.C.1	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-										
E.6.3.3	Pengelolaan Keankaragaman Hayati Kabupaten																
1)	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah Dengan Kode R-4	- SWP I.A Blok I.A.5; - SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; - SWP I.C Blok I.C.1	APBD Kabupaten	-	Dinas Lingkungan Hidup	-											
E.7	PERWUJUDAN ZONA SARANA PELAYANAN UMUM DENGAN KODE SPU																
E.7.1	SUB-ZONA SPU SKALA KOTA KODE SPU-1																
E.7.1.1	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Pelayanan Umum Skala Kota																
1)	Pengembangan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi/Akademi	- SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, dan Blok I.A.9; dan - SWP I.B Blok I.B.2	APBN Swasta	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	-	Swasta											
2)	Pengembangan dan Pengelolaan Pendidikan	- SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, dan Blok I.A.9; dan - SWP I.B Blok I.B.2	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Swasta											
3)	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten	- SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, dan Blok I.A.9; dan - SWP I.B Blok I.B.2	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan	Swasta											
4)	Pengembangan dan pengelolaan fasilitas peribadatan atau rumah ibadah	- SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.7, dan Blok I.A.9; dan - SWP I.B Blok I.B.2	APBD Kabupaten, Swasta	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Swasta											

LADANG KAWAH

INSPEKTUR

KEMALAUJUD

ASISTEN

STAF

KABUPATEN	INSPEKSI	KABUPATEN	ASISTEN	SEKDA

[illegible]

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
									1	2	3	4	5			
3)	Pengembangan dan pengelolaan fasilitas peribadatan atau rumah ibadah	SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.6; dan SWP I.B Blok I.B1.	APBD Kabupaten, Swasta	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Swasta	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043	
E.8	PERWUJUDAN ZONA PERDAGANGAN DAN JASA DENGAN KODE K															
E.8.1	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA DENGAN KODE K-1															
E.8.1.1	Program Pengembangan Perdagangan dan Jasa Skala Kota															
1)	Pengembangan dan pengelolaan pusat perbelanjaan dan niaga pada Sub-Zona perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4; SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Dan Perdagangan	Swasta									
2)	Peningkatan Sarana distribusi perdagangan	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4; SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Dan Perdagangan	Swasta									
E.8.2	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP DENGAN KODE K-2															
E.8.2.1	Program Pengembangan Perdagangan dan Jasa Skala WP															
1)	Pengembangan dan pengelolaan Sarana Perdagangan Dan Jasa pada Sub-Zona perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2	SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Dan Perdagangan	Swasta									
2)	Peningkatan Sarana distribusi perdagangan	SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Dan Perdagangan	Swasta									
E.8.3	SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP DENGAN KODE K-3															
E.8.3.1	Program Pengembangan Perdagangan dan Jasa Skala SWP															
1)	Pengembangan dan pengelolaan Sarana Perdagangan Dan Jasa pada Sub-Zona perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3	SWP I.A Blok I.A.6, Blok I.A.7	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Dan Perdagangan	Swasta									
2)	Peningkatan Sarana distribusi perdagangan	SWP I.A Blok I.A.6, Blok I.A.7	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Dan Perdagangan	Swasta									
E.9	PERWUJUDAN ZONA PERKANTORAN DENGAN KODE KT															
E.9.1	SUB-ZONA PERKANTORAN DENGAN KODE KT															

KABUPATEN	ASISTEN	SEKDA
<i>A</i>	<i>2</i>	<i>4</i>
<i>h</i>		

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN										
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	TP-2							TP-3	TP-4	TP-5	
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	5				
E.9.1.1	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya																	
1)	Penataan kawasan perkantoran pemerintahan dan perkantoran swasta	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2 Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7 Blok I.A.8; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 SWP I.C Blok I.C.2.	APBD Kabupaten, Swasta	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Swasta											
2)	Pemeliharaan bangunan gedung dan pengelolaan Sub-Zona perkantoran dengan kode KT	SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2 Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7 dan Blok I.A.8; SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3, dan SWP I.C Blok I.C.2.	APBD Kabupaten, Swasta	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Swasta											
E.10	PERWUJUDAN ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN KODE PP																	
E.10.1	SUB-ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DENGAN KODE PP																	
E.10.1.1	Program Pengelolaan Persampahan																	
1)	Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah terpadu (TPST)	Blok I.B.2	APBD Kabupaten, Swasta	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Swasta											
2)	Penyediaan Sarana dan Prasarana Tempat Pengolahan Sampah terpadu (TPST) pada Sub-Zona Pengelolaan Persampahan dengan Kode PP	Blok I.B.2	APBD Kabupaten, Swasta	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Swasta											
E.11	PERWUJUDAN ZONA TRANSPORTASI DENGAN KODE TR																	
E.11.1	SUB-ZONA TRANSPORTASI DENGAN KODE TR																	
E.11.1.1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)																	
1)	Pembangunan dan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2; SWP I.C Blok I.C.1.	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan	-	-											
2)	Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	SWP I.B Blok I.B.1 Blok I.B.2; SWP I.C Blok I.C.1.	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Perhubungan	-											
E.11.1.2	Program Pengelolaan Pelayaran																	
1)	Pengoperasian dan pemeliharaan Pelabuhan	SWP I.B Blok I.B.1 Blok I.B.2;	APBD Provinsi,	-	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	-											
			KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN			
			KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN			
			KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN			
			KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN			
			KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN			
			KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN			
			KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN			
			KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN			
			KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN			
			KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN			
			KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN			
			KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN			
			KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN			
			KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN			
			KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN			
			KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN			
			KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN			
			KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN			
			KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN			
			KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN			
			KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN			
			KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN			
			KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN			
			KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN			
			KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN			
			KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN			
			KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN			
			KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN			
			KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN			
			KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN			
			KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN			
			KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN			
			KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN			
			KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN			
			KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN			
			KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN			
			KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN			
			KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN			
			KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN			
			KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN			
			KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN			
			KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN			
			KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN			
			KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN			
			KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN			
			KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN			
			KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN			
			KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN			
			KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN			
			KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN			
			KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN			
			KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN			
			KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN			
			KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN			
			KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN				KABUPATEN			
			KABUPATEN															

KABUPATEN	INSPEKTUR	KEPALA BIDANG	ASISTEN	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGKARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	TP-1	TP-2					TP-3	TP-4	TP-5
									1	2	3	4	5			
	Pengumpulan Regional dan Pelabuhan Pengumpulan Lokal	SWP I.C Blok I.C.1.	APBD Kabupaten					2024	2025	2026	2027	2028	2029			
2)	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpulan Regional dan Pelabuhan Pengumpulan Lokal	SWP I.B Blok I.B.1 Blok I.B.2; SWP I.C Blok I.C.1.	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	-	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	-									
E.12	PERLUJUDAN ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN DENGAN KODE HK															
E.12.1	SUB-ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN DENGAN KODE HK															
1)	Pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas pendukung zona pertahanan dan keamanan	SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4; SWP I.B Blok I.B.2.	APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Pertahanan dan Keamanan	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
E.13	PERLUJUDAN ZONA PERUNTUKAN LAINNYA DENGAN KODE PL															
E.13.1	SUB-ZONA INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM) DENGAN KODE PL-3															
E.13.1.1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)															
1)	Pembangunan Unit Air Baku	SWP I.A Blok I.A.9 SWP I. Blok I.B.1, Blok I.B.2	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
2)	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	SWP I.A Blok I.A.9 SWP I. Blok I.B.1, Blok I.B.2	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-									
E.13.2	SUB-ZONA PERGUDANGAN DENGAN KODE PL-6															
E.13.2.1	Program Pengembangan Kawasan Pergudangan															
1)	Pengembangan dan pengelolaan kawasan Pergudangan	SWP I.A Blok I.B.1	APBD Kabupaten, Swasta			Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Dan Perdagangan	Swasta									

KEBANGSAAN	KEBANGSAAN
AGAMA	AGAMA
KEPALA PUSAT	KEPALA PUSAT
INSPEKTORAT	INSPEKTORAT
KABAG HUKUM	KABAG HUKUM



TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

Handwritten: <i>sk</i>	Handwritten: <i>z</i>	Handwritten: <i>q</i>	Handwritten: <i>f</i>	Handwritten: <i>ku</i>
Machine: sk	Machine: z	Machine: q	Machine: f	Machine: ku

No	Kegiatan	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		Perindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)						Cagar Budaya (CB)	Ekosistem Mangrove (EM)	Hutan Produksi (KHP)	Pertanian (P)				Perikanan (IK)		Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Pariwisata (W)	Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Perdagangan Dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Pengelolaan Persampahan (PP)	Transportasi (TR)	Pertahanan Dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		PS	PS	RTH-2	Taman Kota	RTH-3	Taman Kecamatan	RTH-4	Taman Kelurahan	RTH-5	Taman RW	RTH-6	Taman RT	RTH-7	Pemakaman	RTH-8	Jalur Hijau	CB	Cagar Budaya	EM	Ekosistem Mangroce	HP	Hutan Produksi Tetap	P-1	Tanaman Pangan	P-2	Hortikultura	P-3	Perkebunan	P-4	Peternakan	IK-1	Perikanan Tangkap	IK-2	Perikanan Budi Daya	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	W	Pariwisata	R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-3	Perumahan Kepadatan Sedang	R-4	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1	SPU Skala Kota	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	SPU-4	SPU Skala RW	K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	Perkantoran	PP	Pengelolaan Persampahan	TR	Transportasi	HK	Pertalianan dan Keamanan	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-6	Pergudangan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
011	Perikanan Budidaya	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1. Kepala Dinas
 2. Sekretaris
 3. Kepala Bidang
 4. Asisten
 5. Sekur

No	Kegiatan	ZONA LINDUNG																ZONA BUDI DAYA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		Perindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)								Cagar Budaya (CB)	Ekosistem Mangrove (EM)	Hutan Produksi (KHP)	Pertanian (P)				Perikanan (IK)		Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Pariwisata (W)	Perumahan (R)				Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan Dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Pengelolaan Persampahan (PP)	Transportasi (TR)	Pertahanan Dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		PS	PS								RTH-2	Taman Kota	RTH-3	Taman Kecamatan	RTH-4	Taman Kelurahan	RTH-5	Taman RW	RTH-6	Taman RT	RTH-7	Pemakaman	RTH-8	Jalur Hijau	CB	Cagar Budaya	EM	Ekosistem Mangroce	HP	Hutan Produksi Tetap	P-1	Tanaman Pangan	P-2	Hortikultura	P-3	Perkebunan	P-4	Peternakan	IK-1	Perikanan Tangkap	IK-2	Perikanan Budi Daya	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	W	Pariwisata	R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-3	Perumahan Kepadatan Sedang	R-4	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1	SPU Skala Kota	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	SPU-4	SPU Skala RW	K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	Perkantoran	PP	Pengelolaan Persampahan	TR	Transportasi	HK	Pertahanan dan Keamanan	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-6	Pergudangan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
024	Industri pemintalan, penunaman dan penyempurnaan tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

KEMENTERIAN KEMENTERIAN KEMENTERIAN KEMENTERIAN KEMENTERIAN
 KEMENTERIAN KEMENTERIAN KEMENTERIAN KEMENTERIAN KEMENTERIAN
 KEMENTERIAN KEMENTERIAN KEMENTERIAN KEMENTERIAN KEMENTERIAN
 KEMENTERIAN KEMENTERIAN KEMENTERIAN KEMENTERIAN KEMENTERIAN
 KEMENTERIAN KEMENTERIAN KEMENTERIAN KEMENTERIAN KEMENTERIAN

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	K
	L
	M
	N
	O
	P
	Q
	R
	S
	T
	U
	V
	W
	X
	Y
	Z

A	B	C	D	E

No		Kegiatan	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																																																											
			Perlindungan Setempat (PS)		Ruang Terbuka Hijau (RTH)								Cagar Budaya (CB)		Ekosistem Mangrove (EM)		Hutan Produksi (KHP)		Pertanian (P)				Perikanan (IK)		Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)		Pariwisata (W)		Perumahan (R)				Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan Dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)		Pengelolaan Persampahan (PP)		Transportasi (TR)		Pertahanan Dan Keamanan (HK)		Peruntukan Lainnya (PL)																								
			PS	PS	RTH-2	Taman Kota	RTH-3	Taman Kecamatan	RTH-4	Taman Kelurahan	RTH-5	Taman RW	RTH-6	Taman RT	RTH-7	Pemakaman	RTH-8	Jalur Hijau	CB	Cagar Budaya	EM	Ekosistem Mangrove	HP	Hutan Produksi Tetap	P-1	Tanaman Pangan	P-2	Hortikultura	P-3	Perkebunan	P-4	Peternakan	IK-1	Perikanan Tangkap	IK-2	Perikanan Budi Daya	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	W	Pariwisata	R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-3	Perumahan Kepadatan Sedang	R-4	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1	SPU Skala Kota	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	SPU-4	SPU Skala RW	K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	Perkantoran	PP	Pengelolaan Persampahan	TR	Transportasi	HK	Pertahanan dan Keamanan	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-6	Pergudangan
064	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga	X	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CB	Cagar Budaya	EM	Ekosistem Mangrove	HP	Hutan Produksi Tetap	P-1	Tanaman Pangan	P-2	Hortikultura	P-3	Perkebunan	P-4	Peternakan	IK-1	Perikanan Tangkap	IK-2	Perikanan Budi Daya	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	W	Pariwisata	R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-3	Perumahan Kepadatan Sedang	R-4	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1	SPU Skala Kota	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	SPU-4	SPU Skala RW	K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	Perkantoran	PP	Pengelolaan Persampahan	TR	Transportasi	HK	Pertahanan dan Keamanan	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-6	Pergudangan
065	Konstruksi Gedung Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CB	Cagar Budaya	EM	Ekosistem Mangrove	HP	Hutan Produksi Tetap	P-1	Tanaman Pangan	P-2	Hortikultura	P-3	Perkebunan	P-4	Peternakan	IK-1	Perikanan Tangkap	IK-2	Perikanan Budi Daya	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	W	Pariwisata	R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-3	Perumahan Kepadatan Sedang	R-4	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1	SPU Skala Kota	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	SPU-4	SPU Skala RW	K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	Perkantoran	PP	Pengelolaan Persampahan	TR	Transportasi	HK	Pertahanan dan Keamanan	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-6	Pergudangan
066	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CB	Cagar Budaya	EM	Ekosistem Mangrove	HP	Hutan Produksi Tetap	P-1	Tanaman Pangan	P-2	Hortikultura	P-3	Perkebunan	P-4	Peternakan	IK-1	Perikanan Tangkap	IK-2	Perikanan Budi Daya	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	W	Pariwisata	R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-3	Perumahan Kepadatan Sedang	R-4	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1	SPU Skala Kota	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	SPU-4	SPU Skala RW	K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	Perkantoran	PP	Pengelolaan Persampahan	TR	Transportasi	HK	Pertahanan dan Keamanan	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-6	Pergudangan
067	Konstruksi Jalan dan Jalan Rel	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CB	Cagar Budaya	EM	Ekosistem Mangrove	HP	Hutan Produksi Tetap	P-1	Tanaman Pangan	P-2	Hortikultura	P-3	Perkebunan	P-4	Peternakan	IK-1	Perikanan Tangkap	IK-2	Perikanan Budi Daya	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	W	Pariwisata	R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-3	Perumahan Kepadatan Sedang	R-4	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1	SPU Skala Kota	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	SPU-4	SPU Skala RW	K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	Perkantoran	PP	Pengelolaan Persampahan	TR	Transportasi	HK	Pertahanan dan Keamanan	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-6	Pergudangan
068	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah	T.B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CB	Cagar Budaya	EM	Ekosistem Mangrove	HP	Hutan Produksi Tetap	P-1	Tanaman Pangan	P-2	Hortikultura	P-3	Perkebunan	P-4	Peternakan	IK-1	Perikanan Tangkap	IK-2	Perikanan Budi Daya	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	W	Pariwisata	R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-3	Perumahan Kepadatan Sedang	R-4	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1	SPU Skala Kota	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	SPU-4	SPU Skala RW	K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	Perkantoran	PP	Pengelolaan Persampahan	TR	Transportasi	HK	Pertahanan dan Keamanan	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-6	Pergudangan
069	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CB	Cagar Budaya	EM	Ekosistem Mangrove	HP	Hutan Produksi Tetap	P-1	Tanaman Pangan	P-2	Hortikultura	P-3	Perkebunan	P-4	Peternakan	IK-1	Perikanan Tangkap	IK-2	Perikanan Budi Daya	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	W	Pariwisata	R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-3	Perumahan Kepadatan Sedang	R-4	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1	SPU Skala Kota	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	SPU-4	SPU Skala RW	K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	Perkantoran	PP	Pengelolaan Persampahan	TR	Transportasi	HK	Pertahanan dan Keamanan	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-6	Pergudangan
070	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan	T.B	T.B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CB	Cagar Budaya	EM	Ekosistem Mangrove	HP	Hutan Produksi Tetap	P-1	Tanaman Pangan	P-2	Hortikultura	P-3	Perkebunan	P-4	Peternakan	IK-1	Perikanan Tangkap	IK-2	Perikanan Budi Daya	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	W	Pariwisata	R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-3	Perumahan Kepadatan Sedang	R-4	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1	SPU Skala Kota	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	SPU-4	SPU Skala RW	K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	Perkantoran	PP	Pengelolaan Persampahan	TR	Transportasi	HK	Pertahanan dan Keamanan	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-6	Pergudangan
071	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan	T.B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CB	Cagar Budaya	EM	Ekosistem Mangrove	HP	Hutan Produksi Tetap	P-1	Tanaman Pangan	P-2	Hortikultura	P-3	Perkebunan	P-4	Peternakan	IK-1	Perikanan Tangkap	IK-2	Perikanan Budi Daya	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	W	Pariwisata	R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-3	Perumahan Kepadatan Sedang	R-4	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1	SPU Skala Kota	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	SPU-4	SPU Skala RW	K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	Perkantoran	PP	Pengelolaan Persampahan	TR	Transportasi	HK	Pertahanan dan Keamanan	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-6	Pergudangan
072	Pengurutan	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CB	Cagar Budaya	EM	Ekosistem Mangrove	HP	Hutan Produksi Tetap	P-1	Tanaman Pangan	P-2	Hortikultura	P-3	Perkebunan	P-4	Peternakan	IK-1	Perikanan Tangkap	IK-2	Perikanan Budi Daya	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	W	Pariwisata	R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-3	Perumahan Kepadatan Sedang	R-4	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1	SPU Skala Kota	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	SPU-4	SPU Skala RW	K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	Perkantoran	PP	Pengelolaan Persampahan	TR	Transportasi	HK	Pertahanan dan Keamanan	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-6	Pergudangan
073	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CB	Cagar Budaya	EM	Ekosistem Mangrove	HP	Hutan Produksi Tetap	P-1	Tanaman Pangan	P-2	Hortikultura	P-3	Perkebunan	P-4	Peternakan	IK-1	Perikanan Tangkap	IK-2	Perikanan Budi Daya	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	W	Pariwisata	R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-3	Perumahan Kepadatan Sedang	R-4	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1	SPU Skala Kota	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	SPU-4	SPU Skala RW	K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	Perkantoran	PP	Pengelolaan Persampahan	TR	Transportasi	HK	Pertahanan dan Keamanan	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-6	Pergudangan
074	Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan	T.B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CB	Cagar Budaya	EM	Ekosistem Mangrove	HP	Hutan Produksi Tetap	P-1	Tanaman Pangan	P-2	Hortikultura	P-3	Perkebunan	P-4	Peternakan	IK-1	Perikanan Tangkap	IK-2	Perikanan Budi Daya	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	W	Pariwisata	R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-3	Perumahan Kepadatan Sedang	R-4	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1	SPU Skala Kota	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	SPU-4	SPU Skala RW	K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	Perkantoran	PP	Pengelolaan Persampahan	TR	Transportasi	HK	Pertahanan dan Keamanan	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-6	Pergudangan
075	Konstruksi Bangunan Sipil Parata Bumi	T.B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CB	Cagar Budaya	EM	Ekosistem Mangrove	HP	Hutan Produksi Tetap	P-1	Tanaman Pangan	P-2	Hortikultura	P-3	Perkebunan	P-4	Peternakan	IK-1	Perikanan Tangkap	IK-2	Perikanan Budi Daya	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	W	Pariwisata	R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-3	Perumahan Kepadatan Sedang	R-4	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1	SPU Skala Kota	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	SPU-4	SPU Skala RW	K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	Perkantoran	PP	Pengelolaan Persampahan	TR	Transportasi	HK	Pertahanan dan Keamanan	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-6	Pergudangan
076	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	CB	Cagar Budaya	EM	Ekosistem Mangrove	HP	Hutan Produksi Tetap	P-1	Tanaman Pangan	P-2	Hortikultura	P-3	Perkebunan	P-4	Peternakan	IK-1	Perikanan Tangkap	IK-2	Perikanan Budi Daya	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	W	Pariwisata	R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-3	Perumahan Kepadatan Sedang	R-4	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1	SPU Skala Kota	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	SPU-4	SPU Skala RW	K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	Perkantoran	PP	Pengelolaan Persampahan	TR	Transportasi	HK	Pertahanan dan Keamanan	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-6	Pergudangan
077	Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CB	Cagar Budaya	EM	Ekosistem Mangrove	HP	Hutan Produksi Tetap	P-1	Tanaman Pangan	P-2	Hortikultura	P-3	Perkebunan	P-4	Peternakan	IK-1	Perikanan Tangkap	IK-2	Perikanan Budi Daya	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	W	Pariwisata	R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-3	Perumahan Kepadatan Sedang	R-4	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1	SPU Skala Kota	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	SPU-4	SPU Skala RW	K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	Perkantoran	PP	Pengelolaan Persampahan	TR	Transportasi	HK	Pertahanan dan Keamanan	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-6	Pergudangan

KABUPATEN	INSPEKSI	REKOR	ASISTEN	SEKDA

No		Kegiatan	ZONA LINDUNG																ZONA BUDI DAYA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			Perindungan Setempat (PS)		Ruang Terbuka Hijau (RTH)								Cagar Budaya (CB)	Ekosistem Mangrove (EM)	Hutan Produksi (KHP)		Pertanian (P)				Perikanan (IK)		Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Pariwisata (W)	Perumahan (R)				Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan Dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Pengelolaan Persampahan (PP)	Transportasi (TR)	Pertahanan Dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			PS	PS	RTH-2	Taman Kota	RTH-3	Taman Kecamatan	RTH-4	Taman Kelurahan	RTH-5	Taman RW	RTH-6	Taman RT	RTH-7	Pemakaman	RTH-8	Jalur Hijau	CB	Cagar Budaya	EM	Ekosistem Mangroce	HP	Hutan Produksi Tetap	P-1	Tanaman Pangan	P-2	Hortikultura	P-3	Perkebunan	P-4	Peternakan	IK-1	Perikanan Tangkap	IK-2	Perikanan Budi Daya	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	W	Pariwisata	R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-3	Perumahan Kepadatan Sedang	R-4	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1	SPU Skala Kota	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	SPU-4	SPU Skala RW	K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	Perkantoran	PP	Pengelolaan Persampahan	TR	Transportasi	HK	Pertalianan dan Keamanan	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-6	Pergudangan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
078	Jasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung Pantai	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ASISTEN	ASISTEN	ASISTEN	ASISTEN	ASISTEN
ASISTEN	ASISTEN	ASISTEN	ASISTEN	ASISTEN
ASISTEN	ASISTEN	ASISTEN	ASISTEN	ASISTEN
ASISTEN	ASISTEN	ASISTEN	ASISTEN	ASISTEN
ASISTEN	ASISTEN	ASISTEN	ASISTEN	ASISTEN

SEDA	ASISTEN	RECAUD	INVENTARI	ALMACEN
<i>NA</i>	<i>f</i>	<i>Φ</i>	<i>n</i>	<i>sk</i>

SEKDA	ASISTEN	KELOMPOK	INSTRUKSI	ALASAN/ALASAN
				

No	Kegiatan	ZONA LINDUNG																ZONA BUDI DAYA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		Perindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)								Cagar Budaya (CB)	Ekosistem Mangrove (EM)	Hutan Produksi (KHP)	Pertanian (P)				Perikanan (IK)		Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Pariwisata (W)	Perumahan (R)				Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan Dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Pengelolaan Persampahan (PP)	Transportasi (TR)	Pertahanan Dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		PS	PS	RTH-2	Taman Kota	RTH-3	Taman Kecamatan	RTH-4	Taman Kelurahan	RTH-5	Taman RW	RTH-6	Taman RT	RTH-7	Pemakanan	RTH-8	Jalur Hijau	CB	Cagar Budaya	EM	Ekosistem Mangroce	HP	Hutan Produksi Tetap	P-1	Tanaman Pangan	P-2	Hortikultura	P-3	Perkebunan	P-4	Peternakan	IK-1	Perikanan Tangkap	IK-2	Perikanan Budi Daya	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	W	Pariwisata	R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-3	Perumahan Kepadatan Sedang	R-4	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1	SPU Skala Kota	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	SPU-4	SPU Skala RW	K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	Perkantoran	PP	Pengelolaan Persampahan	TR	Transportasi	HK	Pertahanan dan Keamanan	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-6	Pergudangan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
116	Aktivitas Pelabuhan Perikanan	T.B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

KELOMPOK	INSTRUMEN	REKAMEN	ASISTEN	SEKSI
4	2	5	1	2

No	Kegiatan	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		Perindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Cagar Budaya (CB)	Ekosistem Mangrove (EM)	Hutan Produksi (KHP)	Pertanian (P)				Perikanan (IK)		Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Pariwisata (W)	Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan Dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Pengelolaan Persampahan (PP)	Transportasi (TR)	Pertahanan Dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		PS	PS	RTH-2	Taman Kota	RTH-3	Taman Kecamatan	RTH-4	Taman Kelurahan	RTH-5	Taman RW	RTH-6	Taman RT	RTH-7	Pemakaman	RTH-8	Jalur Hijau	CB	Cagar Budaya	EM	Ekosistem Mangroce	HP	Hutan Produksi Tetap	P-1	Tanaman Pangan	P-2	Hortikultura	P-3	Perkebunan	P-4	Peternakan	IK-1	Perikanan Tangkap	IK-2	Perikanan Budi Daya	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	W	Pariwisata	R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-3	Perumahan Kepadatan Sedang	R-4	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1	SPU Skala Kota	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	SPU-4	SPU Skala RW	K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	Perkantoran	PP	Pengelolaan Persampahan	TR	Transportasi	HK	Pertahanan dan Keamanan	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-6	Pergudangan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
142	Perantara Moneter	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	

KABANG HINDU	INSPEKTOR	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
				

No	Kegiatan	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		Perindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)								Cagar Budaya (CB)	Ekosistem Mangrove (EM)	Hutan Produksi (KHP)	Pertanian (P)				Perikanan (IK)		Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Pariwisata (W)	Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan Dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Pengelolaan Persampahan (PP)	Transportasi (TR)	Pertahanan Dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		PS	PS	RTH-2	Taman Kota	RTH-3	Taman Kecamatan	RTH-4	Taman Kelurahan	RTH-5	Taman RW	RTH-6	Taman RT	RTH-7	Pemukaman	RTH-8	Jalur Hijau	CB	Cagar Budaya	EM	Ekosistem Mangroce	HP	Hutan Produksi Tetap	P-1	Tanaman Pangan	P-2	Hortikultura	P-3	Perkebunan	P-4	Peternakan	IK-1	Perikanan Tangkap	IK-2	Perikanan Budi Daya	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	W	Pariwisata	R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-3	Perumahan Kepadatan Sedang	R-4	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1	SPU Skala Kota	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	SPU-4	SPU Skala RW	K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	Perkantoran	PP	Pengelolaan Persampahan	TR	Transportasi	HK	Pertahanan dan Keamanan	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-6	Pergudangan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
154	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	



SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BIDANG	
INSPEKTORAT	
KABID HUKUM	

ASISTEN	REDAKSI	ASISTEN	REDAKSI	ASISTEN	REDAKSI
					

SECCO	
ASISTENTE	
RECAUDADOR	
INTERPRETE	
ABOLADO	

No		Kegiatan	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			Perindungan Setempat (PS)		Ruang Terbuka Hijau (RTH)						Cagar Budaya (CB)	Ekosistem Mangrove (EM)	Hutan Produksi (KHP)	Pertanian (P)			Perikanan (IK)		Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Pariwisata (W)	Perumahan (R)			Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Perdagangan Dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Pengelolaan Persampahan (PP)	Transportasi (TR)	Pertahanan Dan Keamanan (HK)	Peruntukan Lainnya (PL)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			PS	PS	RTH-2	Taman Kota	RTH-3	Taman Kecamatan	RTH-4	Taman Kelurahan	RTH-5	Taman RW	RTH-6	Taman RT	RTH-7	Pemakaman	RTH-8	Jalur Hijau	CB	Cagar Budaya	EM	Ekosistem Mangroce	HP	Hutan Produksi Tetap	P-1	Tanaman Pangan	P-2	Hortikultura	P-3	Perkebunan	P-4	Peternakan	IK-1	Perikanan Tangkap	IK-2	Perikanan Budi Daya	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	W	Pariwisata	R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-3	Perumahan Kepadatan Sedang	R-4	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1	SPU Skala Kota	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	SPU-4	SPU Skala RW	K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	KT	Perkantoran	PP	Pengelolaan Persampahan	TR	Transportasi	HK	Pertahanan dan Keamanan	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-6	Pergudangan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
201		Aktivitas Rumah Sakit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

4
 8
 9
 1
 2

7	2	3	1	4
---	---	---	---	---

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BUOL NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN BIAU

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG,
KETENTUAN TATA BANGUNAN, DAN KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

ZONA LINDUNG

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90%
d	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	jalan arteri	-
	jalan kolektor	-
	jalan lokal	-
	jalan lingkungan	-
c	jarak bebas antar bangunan minimal	3 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	5 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan tanggul pada daerah rawan banjir; b. menyediakan tanggul pada daerah rawan abrasi; c. menyediakan patok/tanda batas sempadan; d. menyediakan papan peringatan; dan e. menyediakan jalur inspeksi.	

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90%
d	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	jalan arteri	12,5 meter
	jalan kolektor	8,5 meter
	jalan lokal	3,5 meter
	jalan lingkungan	3,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	3 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	5 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan tempat parkir; b. menyediakan jalur pejalan kaki dan/atau <i>jogging track</i> ;	

KADAG HUKUM	INSPEKTORAT	KEPALA DPKAD	ASISTEN	SEKDA
				

	c. menyediakan fasilitas umum taman kota; d. menyediakan perabot jalan (<i>street furniture</i>); e. menyediakan ruang evakuasi; f. menyediakan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas; g. menyediakan hidran; dan h. menyediakan prasarana lingkungan lainnya.	
Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90%
d	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	jalan arteri	12,5 meter
	jalan kolektor	8,5 meter
	jalan lokal	3,5 meter
	jalan lingkungan	3,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	3 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	5 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan tempat parkir; b. menyediakan jalur pejalan kaki dan/atau <i>jogging track</i> ; c. menyediakan fasilitas umum taman kecamatan; d. menyediakan perabot jalan (<i>street furniture</i>); e. menyediakan ruang evakuasi; f. menyediakan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas; g. menyediakan hidran; dan h. menyediakan prasarana lingkungan lainnya.	
Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90%
d	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	jalan arteri	-
	jalan kolektor	-
	jalan lokal	-
	jalan lingkungan	-
c	jarak bebas antar bangunan minimal	3 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	5 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan tempat parkir; b. menyediakan jalur pejalan kaki; c. menyediakan fasilitas umum taman kelurahan; d. menyediakan perabot jalan (<i>street furniture</i>); e. menyediakan ruang evakuasi;	

KABAG HUKUM	INSPEKTORAT	KEPALA BPKAD	ASISTEN	SEKDA
<i>A</i>	<i>2</i>	<i>A</i>	<i>f</i>	<i>ra</i>

	f. menyediakan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas;
	g. menyediakan hidran; dan
	h. menyediakan prasarana lingkungan lainnya.
Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 10%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,1
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal 90%
d	luas kaveling minimum -
II	Ketentuan Tata Bangunan
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum 5 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum
	jalan arteri -
	jalan kolektor -
	jalan lokal -
	jalan lingkungan -
c	jarak bebas antar bangunan minimal 2 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum 3 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
	a. menyediakan tempat parkir;
	b. menyediakan jalur pejalan kaki;
	c. menyediakan fasilitas umum taman RW;
	d. menyediakan perabot jalan (<i>street furniture</i>);
	e. menyediakan ruang evakuasi;
	f. menyediakan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas;
	g. menyediakan hidran; dan
	h. menyediakan prasarana lingkungan lainnya.
Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 10%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 0,1
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal 90%
d	luas kaveling minimum -
II	Ketentuan Tata Bangunan
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum 5 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum
	jalan arteri -
	jalan kolektor -
	jalan lokal -
	jalan lingkungan -
c	jarak bebas antar bangunan minimal 2 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum 3 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum 2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
	a. menyediakan tempat parkir;
	b. menyediakan jalur pejalan kaki;
	c. menyediakan fasilitas umum taman RT;
	d. menyediakan perabot jalan (<i>street furniture</i>);
	e. menyediakan ruang evakuasi;
	f. menyediakan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas;
	g. menyediakan hidran; dan
	h. menyediakan prasarana lingkungan lainnya.

KABAG HUKUM	INSPEKTORAT	KEPALA BKAD	ASISTEN	SEKDA
				

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	30%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70%
d	luas kaveling minimum	
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
	jalan arteri	8,5 meter
	jalan kolektor	7,5 meter
	jalan lokal	3,5 meter
	jalan lingkungan	3,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan tempat parkir; b. menyediakan jalur pejalan kaki; c. menyediakan fasilitas umum pemakaman; d. menyediakan perabot jalan (<i>street furniture</i>); e. menyediakan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas; f. menyediakan hidran; dan g. menyediakan prasarana lingkungan lainnya.	
Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	-
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90%
d	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
	jalan arteri	-
	jalan kolektor	-
	jalan lokal	-
	jalan lingkungan	-
c	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jalur pejalan kaki; dan b. menyediakan perabot jalan (<i>street furniture</i>).	

Zona Cagar Budaya dengan Kode CB

Sub-Zona Cagar Budaya dengan kode CB		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,2
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 meter

KASAG HUKUM	INSPEKTORAT	KEPALA SIPKAD	ASISTEN	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	jalan arteri	15 meter
	jalan kolektor	15 meter
	jalan lokal	15 meter
	jalan lingkungan	15 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	3 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan papan informasi bangunan atau situs cagar budaya; b. menyediakan pos keamanan; c. menyediakan tempat parkir; d. menyediakan kantor/ruang pengelola dan ruang arsip; e. menyediakan toilet umum dan tempat pembuangan sampah; f. menyediakan hidran; dan g. menyediakan fasilitas lain yang berkenaan dengan pemeliharaan bangunan cagar budaya.	

Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM

Sub-Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	5%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	95%
d	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	jalan arteri	-
	jalan kolektor	-
	jalan lokal	-
	jalan lingkungan	-
c	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jalur pejalan kaki; b. menyediakan jalan inspeksi dan/atau jembatan kayu; c. menyediakan papan informasi kawasan ekosistem mangrove; dan d. menyediakan tempat pembuangan sampah.	

ZONA BUDI DAYA

Zona Hutan Produksi dengan kode KHP

Sub-Zona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	5%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	95%
d	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
	jalan arteri	-
	jalan kolektor	-

KABAG HUKUM	INSPEKTORAT	KEPALA BPKAD	ASISTEN	SEKDA
				

	jalan lokal	-
	jalan lingkungan	-
c	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan prasarana penunjang keselamatan umum; b. menyediakan fasilitas umum untuk penunjang kegiatan pengelolaan hutan; c. menyediakan pagar pembatas dan/atau papan informasi; dan d. menyediakan jalur inspeksi kawasan hutan.	

Zona Pertanian dengan kode P

Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90%
d	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
	jalan arteri	-
	jalan kolektor	7,5 meter
	jalan lokal	5,5 meter
	jalan lingkungan	3,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan saluran irigasi; b. menyediakan gudang penyimpanan dan/atau gubuk padi; c. menyediakan akses jalan dan/atau jembatan yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi hasil pertanian; d. menyediakan jalan usaha tani dan/atau jalur pejalan kaki; e. menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan tanaman pangan; f. menyediakan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau; dan g. menyediakan prasarana lingkungan lainnya	
Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	20%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,4
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
d	luas kaveling minimum	
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
	jalan arteri	-
	jalan kolektor	-
	jalan lokal	5,5 meter
	jalan lingkungan	3,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	3 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter

KABAG HUKUM	INSPEKTORAT	KEPALA BPKAD	ASISTEN	SEKDA
				

III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan gudang penyimpanan; b. menyediakan akses jalan dan/atau jembatan yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi hasil pertanian; c. menyediakan jalan usaha tani dan/atau jalur pejalan kaki; d. menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan hortikultura; e. menyediakan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau; dan f. menyediakan prasarana lingkungan lainnya	
Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	20%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,4
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
d	luas kaveling minimum	
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	jalan arteri	12,5 meter
	jalan kolektor	-
	jalan lokal	5,5 meter
	jalan lingkungan	3,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	4 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	4 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	4 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan gudang penyimpanan; b. menyediakan akses jalan dan/atau jembatan yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi hasil pertanian; c. menyediakan jalan usaha tani dan/atau jalur pejalan kaki; d. menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perkebunan; e. menyediakan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau; dan f. menyediakan prasarana lingkungan lainnya.	
Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	30%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,6
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70%
d	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	jalan arteri	-
	jalan kolektor	-
	jalan lokal	5,5 meter
	jalan lingkungan	3,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	4 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	4 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	4 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan sarana pengolah limbah ternak; b. menyediakan sarana penunjang kegiatan peternakan; c. menyediakan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau; dan d. menyediakan prasarana lingkungan lainnya.	

KABAG HUKUM	INSPEKTORAT	KEPALA SPKAD	ASISTEN	SEKDA
				

Zona Perikanan dengan kode IK

Sub-Zona Perikanan Tangkap dengan kode IK-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,6
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	jalan arteri	12,5 meter
	jalan kolektor	7,5 meter
	jalan lokal	3,5 meter
	jalan lingkungan	2,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	4 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	4 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	4 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan tempat parkir b. menyediakan tempat pelelangan ikan; c. menyediakan sarana pendukung kegiatan perikanan tangkap lainnya; d. menyediakan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau; dan e. menyediakan prasarana lingkungan lainnya.	
Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	30%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,6
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70%
d	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	jalan arteri	12,5 meter
	jalan kolektor	7,5 meter
	jalan lokal	5,5 meter
	jalan lingkungan	3,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	4 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	4 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	4 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan tempat parkir b. menyediakan tempat penyimpanan dan/atau <i>cold storage</i> ; c. menyediakan sarana pendukung kegiatan perikanan budi daya lainnya; d. menyediakan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau; dan e. menyediakan prasarana lingkungan lainnya.	

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL

Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	40%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,6
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d	luas kaveling minimum	-

KABAG. HUKUM	INSPEKTORAT	KEPALA BPKAD	ASISTEN	SEKDA
				

II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	Jalan arteri	12,5 meter
	Jalan kolektor	-
	Jalan lokal	5,5 meter
	Jalan lingkungan	-
c	jarak bebas antar bangunan minimal	2 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	6 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	6 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan tempat parkir; b. menyediakan pagar pembatas/keamanan; c. menyediakan pos keamanan; d. menyediakan peralatan pemadam kebakaran; e. menyediakan dimensi jaringan jalan; f. menyediakan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau; dan g. menyediakan prasarana lingkungan lainnya.	

Zona Pariwisata dengan kode W

Sub-Zona Pariwisata dengan kode W		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	40%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,6
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	60%
d	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	Jalan arteri	12,5 meter
	Jalan kolektor	7,5 meter
	Jalan lokal	5,5 meter
	Jalan lingkungan	3,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	2 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan tempat parkir; b. menyediakan jalur pejalan kaki; c. menyediakan aksesibilitas untuk difabel; d. menyediakan dimensi jaringan jalan; e. menyediakan kelengkapan jalan; f. menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial penunjang kegiatan wisata; g. menyediakan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau; dan h. menyediakan prasarana lingkungan lainnya.	

Zona Perumahan dengan kode R

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d	luas kaveling minimum	60 m ²

KABAG HUKUM	INSPEKTORAT	KAPALA BPKAD	ASISTEN	SEKDA
				

II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
	Jalan arteri	8,5 meter
	Jalan kolektor	7,5 meter
	Jalan lokal	6 meter
	Jalan lingkungan	3,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	1 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan sarana pendidikan; b. menyediakan sarana peribadatan; c. menyediakan sarana kesehatan; d. menyediakan sarana perdagangan; e. menyediakan ruang terbuka hijau berupa taman; f. menyediakan tempat bermain dan berolahraga; g. menyediakan jaringan jalan; h. menyediakan jaringan air minum; i. menyediakan jaringan air limbah; j. menyediakan jaringan persampahan; k. menyediakan jaringan listrik; l. menyediakan jaringan telekomunikasi; m. menyediakan hidran umum dan hidran kebakaran; dan n. menyediakan papan penanda jalur, titik kumpul, dan/atau tempat evakuasi.	
Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d	luas kaveling minimum	90 m ²
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	Jalan arteri	12,5 meter
	Jalan kolektor	7,5 meter
	Jalan lokal	5,5 meter
	Jalan lingkungan	3,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	2 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan sarana pendidikan; b. menyediakan sarana peribadatan; c. menyediakan sarana kesehatan; d. menyediakan sarana perdagangan; e. menyediakan ruang terbuka hijau berupa taman; f. menyediakan tempat bermain dan berolahraga; g. menyediakan jaringan jalan dan jalur hijau; h. menyediakan jalur pejalan kaki; i. menyediakan jaringan air minum; j. menyediakan jaringan air limbah; k. menyediakan jaringan persampahan; l. menyediakan jaringan listrik;	

KABAG HUKUM	INSPEKTORAT	KEPALA BPKAD	ASISTEN	SEKDA
				

	m. menyediakan jaringan telekomunikasi;	
	n. menyediakan hidran umum dan hidran kebakaran; dan	
	o. menyediakan papan penanda jalur, titik kumpul, dan/atau tempat evakuasi.	
Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	40%
d	luas kaveling minimum	120 m ²
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	Jalan arteri	12,5 meter
	Jalan kolektor	-
	Jalan lokal	5,5 meter
	Jalan Lingkungan	-
c	jarak bebas antar bangunan minimal	1 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan sarana pendidikan;	
	b. menyediakan sarana peribadatan;	
	c. menyediakan sarana kesehatan;	
	d. menyediakan sarana perdagangan;	
	e. menyediakan ruang terbuka hijau berupa taman;	
	f. menyediakan tempat bermain dan berolahraga;	
	g. menyediakan jaringan jalan;	
	h. menyediakan jalur pejalan kaki dan jalur hijau;	
	i. menyediakan jaringan air minum;	
	j. menyediakan jaringan air limbah;	
	k. menyediakan jaringan persampahan;	
	l. menyediakan jaringan listrik;	
	m. menyediakan jaringan telekomunikasi;	
	n. menyediakan hidran umum dan hidran kebakaran; dan	
	o. menyediakan papan penanda jalur, titik kumpul, dan/atau tempat evakuasi.	

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	Jalan arteri	12,5 meter
	Jalan kolektor	7,5 meter
	Jalan lokal	5,5 meter
	Jalan lingkungan	3,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	2 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter

KABAG HUKUM	INSPEKTORAT	KEPALA BKAD	ASISTEN	SEKDA
				

III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan tempat parkir; b. menyediakan fasilitas umum; c. menyediakan jalur pejalan kaki dan trotoar; d. menyediakan jaringan drainase tertutup dan/atau terbuka; e. menyediakan lampu penerangan; f. menyediakan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau; g. menyediakan hidran umum dan hidran kebakaran; dan h. menyediakan papan nama dan kantor pengelola; dan i. menyediakan prasarana lingkungan lainnya.	
Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	Jalan arteri	12,5 meter
	Jalan kolektor	7,5 meter
	Jalan lokal	5,5 meter
	Jalan lingkungan	3,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	2 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan tempat parkir; b. menyediakan fasilitas umum; c. menyediakan jalur pejalan kaki dan trotoar; d. menyediakan jaringan drainase tertutup dan/atau terbuka; e. menyediakan lampu penerangan; f. menyediakan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau; g. menyediakan hidran umum dan hidran kebakaran; dan h. menyediakan papan nama dan kantor pengelola; dan i. menyediakan prasarana lingkungan lainnya.	
Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	Jalan arteri	12,5 meter
	Jalan kolektor	7,5 meter
	Jalan lokal	5,5 meter
	Jalan lingkungan	3,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	2 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	

KABAG HUKUM	INSPEKTORAT	KEPALA OPD	ASISTEN	SEKDA
				

	a. menyediakan tempat parkir; b. menyediakan fasilitas umum; c. menyediakan jalur pejalan kaki dan trotoar; d. menyediakan jaringan drainase tertutup dan/atau terbuka; e. menyediakan lampu penerangan; f. menyediakan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau; g. menyediakan hidran umum dan hidran kebakaran; h. menyediakan papan nama dan kantor pengelola; dan i. menyediakan prasarana lingkungan lainnya.	
Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	9 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	Jalan arteri	12,5 meter
	Jalan kolektor	7,5 meter
	Jalan lokal	5,5 meter
	Jalan lingkungan	3,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	2 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan tempat parkir; b. menyediakan fasilitas umum; c. menyediakan jalur pejalan kaki dan trotoar; d. menyediakan jaringan drainase tertutup dan/atau terbuka; e. menyediakan lampu penerangan; f. menyediakan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau; g. menyediakan hidran umum dan hidran kebakaran; dan h. menyediakan papan nama dan kantor pengelola; dan i. menyediakan prasarana lingkungan lainnya.	

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	3,5
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	24 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	Jalan arteri	12,5 meter
	Jalan kolektor	7,5 meter
	Jalan lokal	5,5 meter
	Jalan lingkungan	3,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	2 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter

KABAG HUKUM	INSPEKTORAT	KEPALA BPKAD	ASISTEN	SEKDA
				

III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan tempat parkir b. menyediakan jalur pejalan kaki; c. menyediakan penerangan jalan umum, bangku, tempat sampah, dan fasilitas pelengkap jalur pejalan kaki lainnya; d. menyediakan sarana peribadatan; e. menyediakan sarana transportasi umum; f. menyediakan fasilitas difabel pada jalur pejalan kaki dan pada bangunan; g. menyediakan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau; h. menyediakan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas; i. menyediakan jalur hijau; j. menyediakan ruang khusus untuk kegiatan informal; k. menyediakan hidran umum dan hidran kebakaran; dan l. menyediakan prasarana lingkungan lainnya.	
Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,8
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	Jalan arteri	12,5 meter
	Jalan kolektor	7,5 meter
	Jalan lokal	5,5 meter
	Jalan lingkungan	3,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	1 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan tempat parkir b. menyediakan jalur pejalan kaki; c. menyediakan penerangan jalan umum, bangku, tempat sampah, dan fasilitas pelengkap jalur pejalan kaki lainnya; d. menyediakan sarana peribadatan; e. menyediakan sarana transportasi umum; f. menyediakan fasilitas difabel pada jalur pejalan kaki dan pada bangunan; g. menyediakan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau; h. menyediakan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas; i. menyediakan jalur hijau; j. menyediakan ruang khusus untuk kegiatan informal; k. menyediakan hidran umum dan hidran kebakaran; dan l. menyediakan prasarana lingkungan lainnya.	
Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,8
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	Jalan arteri	12,5 meter

KABAG HUKUM	INSPEKTORAT	KEPALA BPKAD	ASISTEN	SEKDA
				

	Jalan kolektor	7,5 meter
	Jalan lokal	5,5 meter
	Jalan lingkungan	3,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	1 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan tempat parkir b. menyediakan jalur pejalan kaki; c. menyediakan penerangan jalan umum, bangku, tempat sampah, dan fasilitas pelengkap jalur pejalan kaki lainnya; d. menyediakan sarana peribadatan; e. menyediakan sarana transportasi umum; f. menyediakan fasilitas difabel pada jalur pejalan kaki dan pada bangunan; g. menyediakan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau; h. menyediakan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas; i. menyediakan jalur hijau; j. menyediakan ruang khusus untuk kegiatan informal; k. menyediakan hidran umum dan hidran kebakaran; dan l. menyediakan prasarana lingkungan lainnya.	

Zona Perkantoran dengan kode KT

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	3,0
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	40%
d	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	24 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	Jalan arteri	12,5 meter
	Jalan kolektor	6 meter
	Jalan lokal	3,5 meter
	Jalan lingkungan	2,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	3 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan tempat parkir; b. menyediakan jalur pejalan kaki; c. menyediakan penerangan jalan umum, bangku, tempat sampah, dan fasilitas pelengkap jalur pejalan kaki lainnya; d. menyediakan sarana peribadatan; e. menyediakan sarana transportasi umum; f. menyediakan sarana kuliner; g. menyediakan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau; h. menyediakan jaringan utilitas perkotaan; i. menyediakan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas; j. menyediakan hidran umum dan hidran kebakaran; dan k. menyediakan prasarana lingkungan lainnya.	

KABAG HUKUM	INSPEKTORAT	KEPALA BPKAD	ASISTEN	SEKDA
				

Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP

Sub-Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,0
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	50%
d	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	jalan arteri	12,5 meter
	jalan kolektor	12,5 meter
	jalan lokal	3,5 meter
	jalan lingkungan	2,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	2 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan tempat parkir; b. menyediakan dimensi jaringan jalan; c. menyediakan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau; d. menyediakan pos keamanan; e. menyediakan fasilitas umum penunjang kegiatan pengelolaan persampahan; f. menyediakan prasarana lingkungan lainnya.	

Zona Transportasi dengan kode TR

Sub-Zona Transportasi dengan kode TR		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
d	luas kaveling minimum	
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	jalan arteri	21 meter
	jalan kolektor	15 meter
	jalan lokal	8 meter
	jalan lingkungan	6 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	2 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan tempat parkir; b. menyediakan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas; c. menyediakan pos keamanan; d. menyediakan jalur pejalan kaki; e. menyediakan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau; f. menyediakan sarana peribadatan; g. menyediakan dimensi jaringan jalan; h. menyediakan kelengkapan jalan; i. menyediakan ruang bongkar muat; dan j. menyediakan prasarana lingkungan lainnya.	

KABAG HUKUM	INSPEKTORAT	KEPALA BKAD	ASISTEN	SEKDA
				

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	jalan arteri	12,5 meter
	jalan kolektor	12,5 meter
	jalan lokal	3,5 meter
	jalan lingkungan	2,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	2 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan tempat parkir; b. menyediakan jalur pejalan kaki; c. menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) privat dan ruang terbuka nonhijau; d. menyediakan sarana dan prasarana untuk komponen pendukung kegiatan pertahanan negara; e. menyediakan dimensi jaringan jalan; f. menyediakan kelengkapan jalan; dan g. menyediakan prasarana lingkungan lainnya.	

Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL

Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70 %
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30 %
d	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	Jalan arteri	-
	Jalan kolektor	-
	Jalan lokal	-
	Jalan lingkungan	-
c	jarak bebas antar bangunan minimal	15 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	15 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	15 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan fasilitas pendukung instalasi pengelolaan air minum (IPAM); b. menyediakan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau; dan c. menyediakan jaringan jalan; dan d. menyediakan prasarana lingkungan lainnya.	
Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,8
c	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%

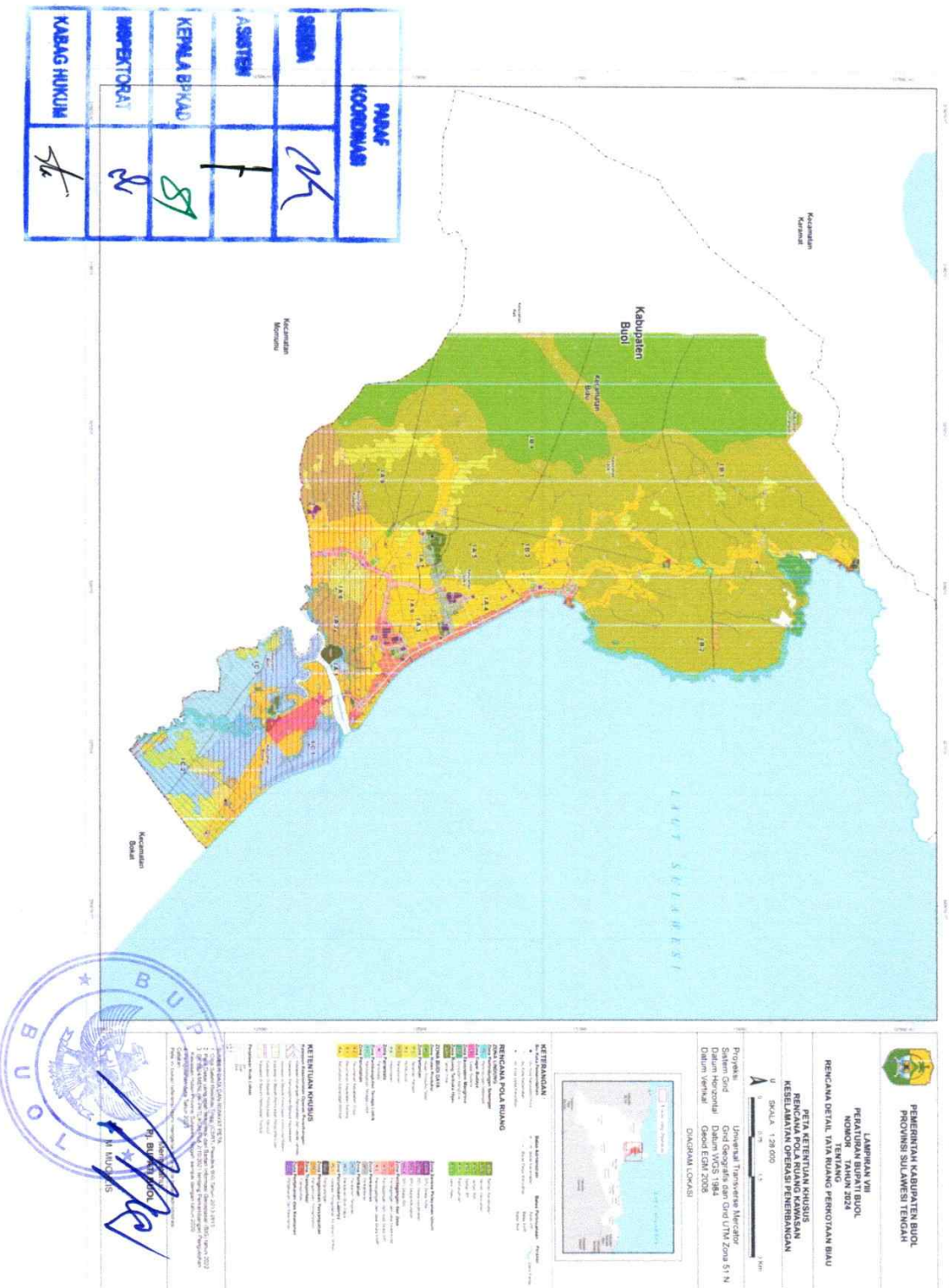
KABAG HUKUM	INSPEKTORAT	KEPALA BPKAD	ASISTEN	SEKDA
<i>Ah</i>	<i>W</i>	<i>B</i>	<i>f</i>	<i>Ar</i>

d	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	18 meter
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	
	jalan arteri	12,5 meter
	jalan kolektor	12,5 meter
	jalan lokal	5 meter
	jalan lingkungan	3,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	3 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan tempat parkir; b. menyediakan sarana penyimpanan barang distribusi; c. menyediakan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau; dan d. menyediakan prasarana lingkungan lainnya.	

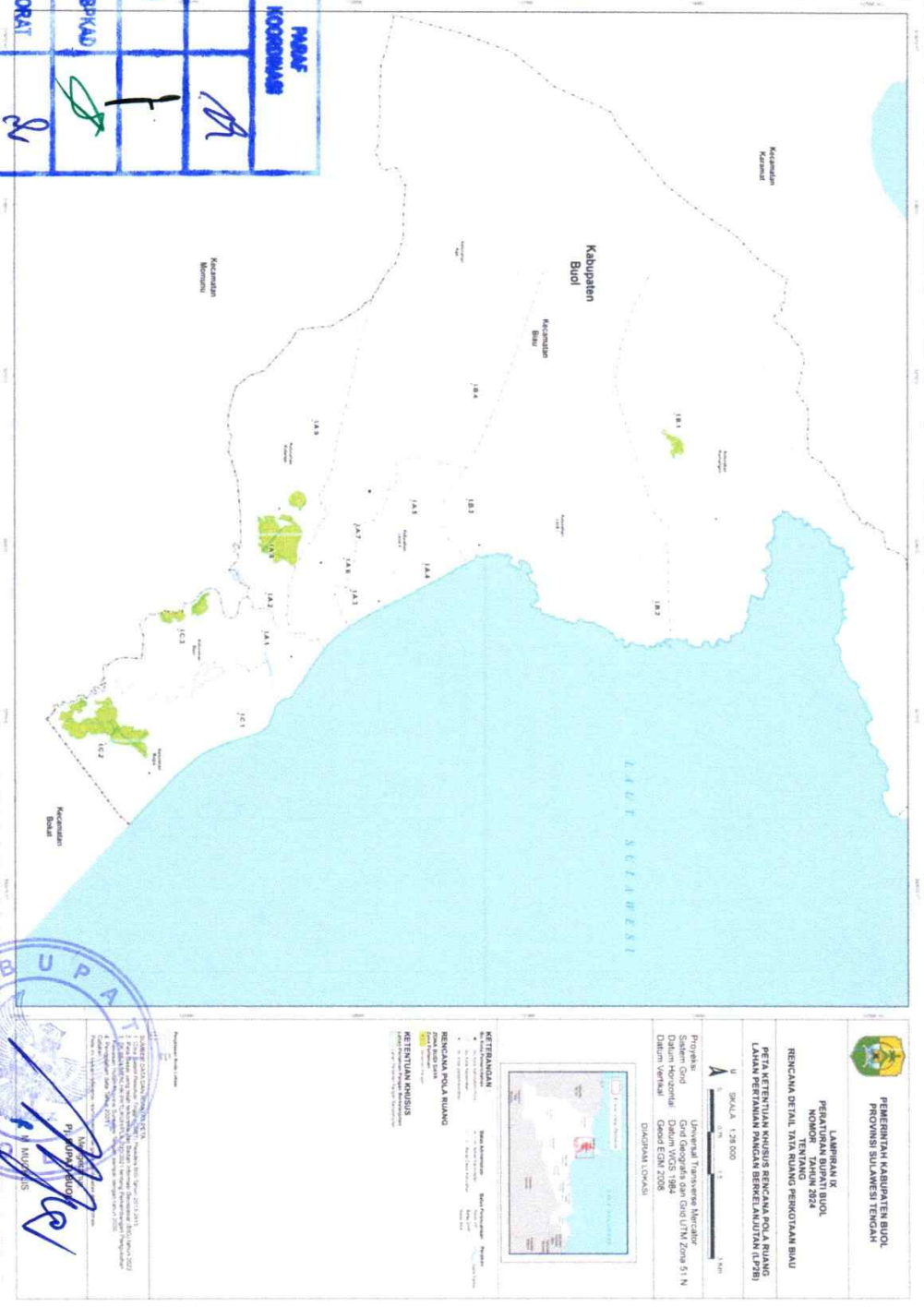
PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KEPALA BPKAD	<i>[Signature]</i>
INSPEKTORAT	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>


 Pj. BUPATI BUOL, *[Signature]*
 M. MUCHLIS

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BUOL NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN BIAU



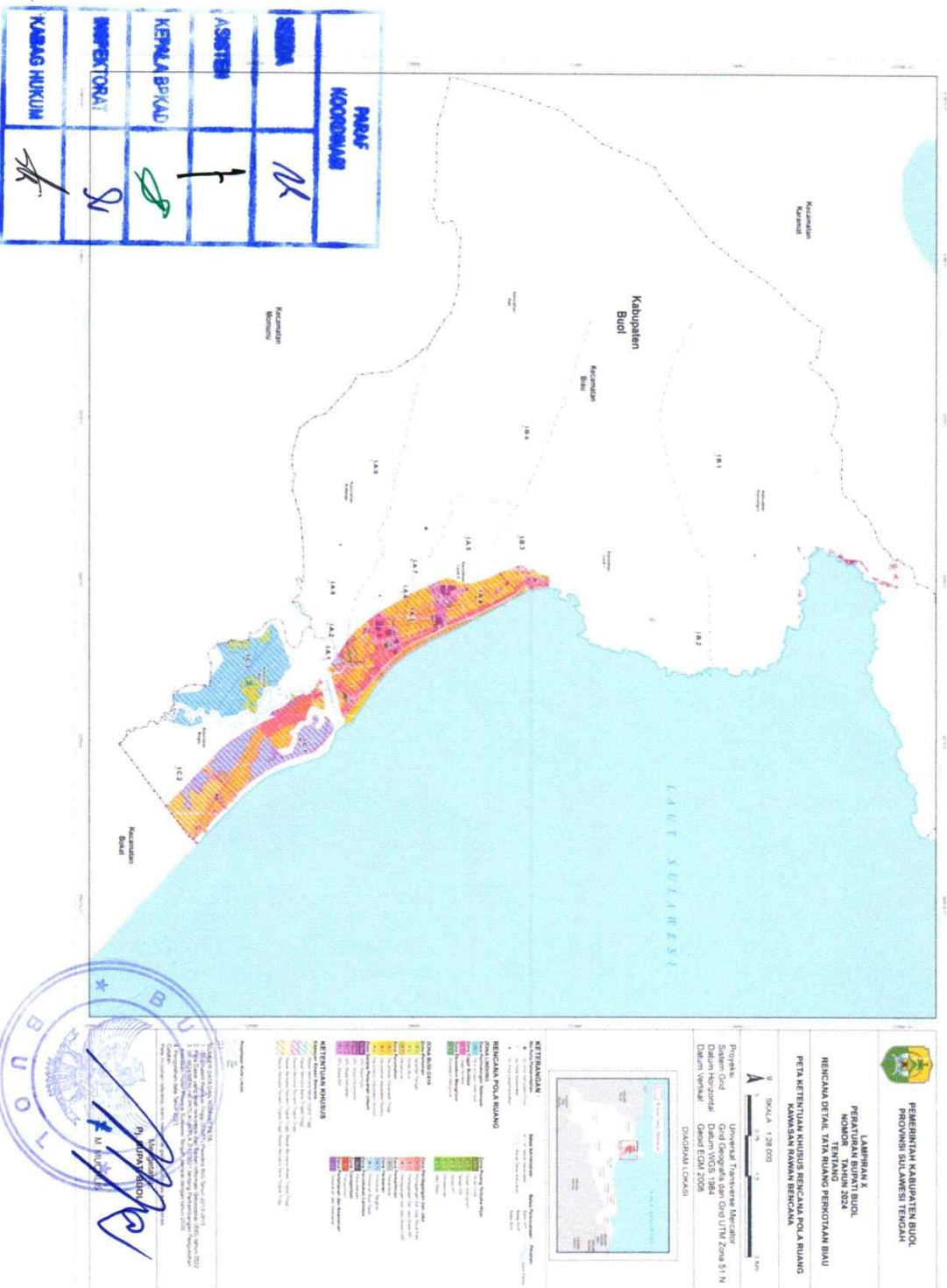
LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI BUOL NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 PERKOTAAN BIAU



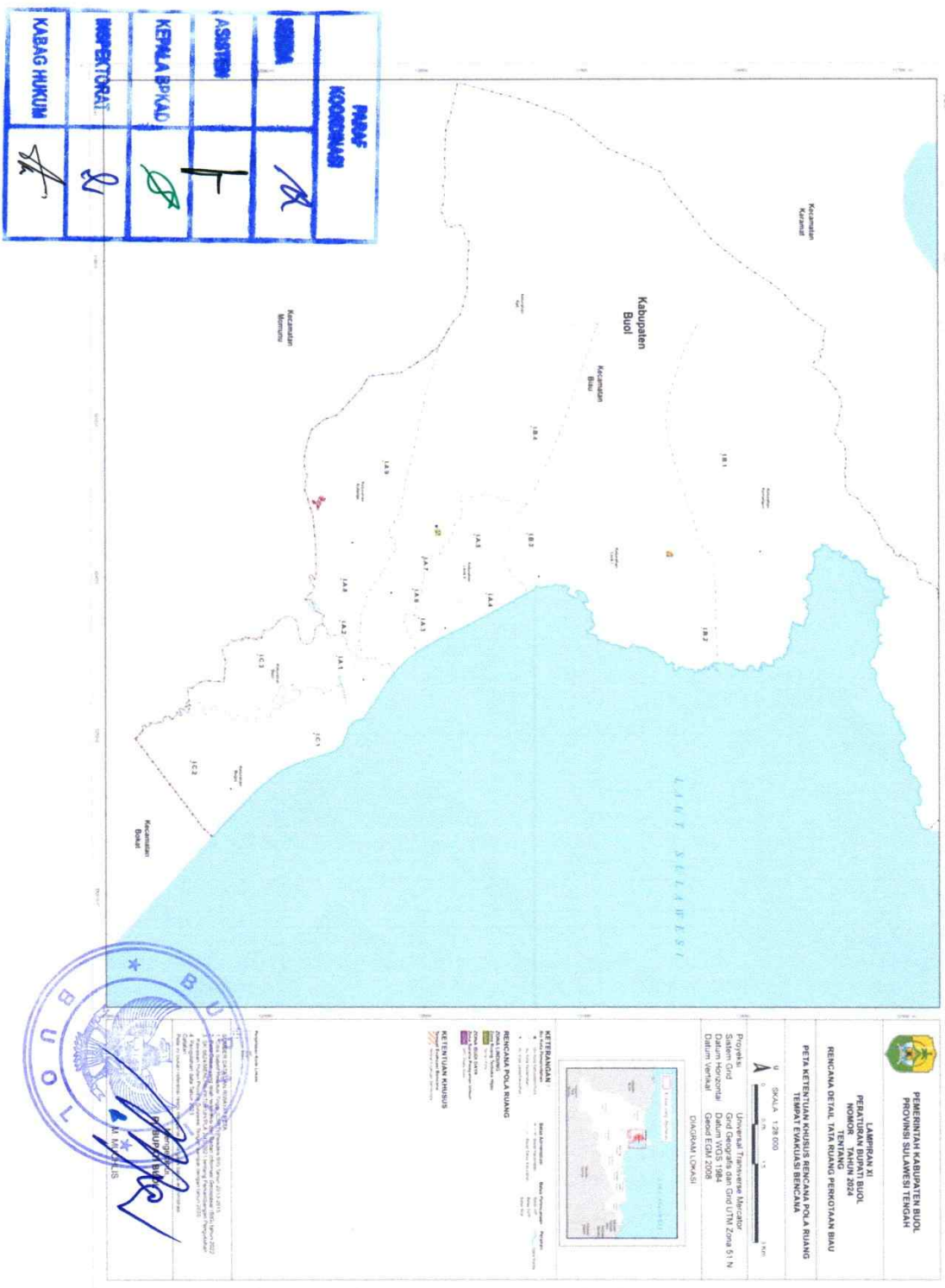
MAMF KOGERNAS	
SEKDA	A
ASSTEN	i
KEMLA BPKAD	g
INSPEKTORAT	u
KABAG HUKUM	h



LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI BUOL NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN BIAU



LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI BUOL NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN BIAU



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI BUOL
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN BIAU

PETA KETERANGAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
TEMPAT EVALUASI RENCANA

KETERANGAN:

- 1. RENCANA POLA RUANG
- 2. RENCANA POLA RUANG
- 3. RENCANA POLA RUANG
- 4. RENCANA POLA RUANG
- 5. RENCANA POLA RUANG
- 6. RENCANA POLA RUANG
- 7. RENCANA POLA RUANG
- 8. RENCANA POLA RUANG
- 9. RENCANA POLA RUANG
- 10. RENCANA POLA RUANG

KETERANGAN KHUSUS:

1. RENCANA POLA RUANG

2. RENCANA POLA RUANG

3. RENCANA POLA RUANG

4. RENCANA POLA RUANG

5. RENCANA POLA RUANG

6. RENCANA POLA RUANG

7. RENCANA POLA RUANG

8. RENCANA POLA RUANG

9. RENCANA POLA RUANG

10. RENCANA POLA RUANG

BUOL

PERKOTAAN BIAU

